



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PRESEPSI PEGAWAI DPKD SUMATERA BARAT TERHADAP PENERAPAN SISTEM AKUNSI KEUANGAN DAERAH PADA DPKD SUMATERA BARAT**

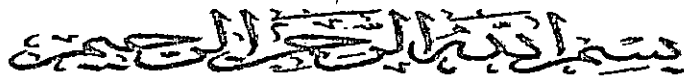
## **SKRIPSI**



**ANINDITO ADITYA  
06153127**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-NYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Persepsi Pegawai DPKD Sumbar terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, pengarahan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Allah SWT yang telah membuat penulis hidup sampai saat ini dan bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang penulis sayangi.
2. Kedua orang tua tercinta (Andra Adi rekanto dan Zorita Amien) dan adikku tersayang (Annisa Andriani Adisty) yang telah banyak berkorban baik moril dan materil demi pendidikan dan masa depan penulis. Pengorbanan mereka takkan bisa digantikan dengan apapun.

3. Om dan Tante (Masril Syukur dan Zoreva Amien). Meraka berdua telah berperan layaknya orang tua yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatian untuk penulis, Sepupu (Adysti, Rio, Arga & Farli), Om Zal & Bunda, Romo & Tante Niña, serta seluruh kerabat yang tidak memungkinkan untuk disebutkan namanya satu persatu.
4. Bapak Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi sekaligus kepada jajaran pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. Bapak Drs. Edi Herman, MBA, Akt sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta semangat yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas kesabaran dan kemudahan yang bapak berikan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Suhandi, Msi, Ak dan bapak Dr. H. Yuskar, SE. MA, Ak selaku penguji yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Yuskar, SE. MA, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Drs. Riwayadi, MBA, Ak selaku Sekretaris jurusan Akuntansi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelenggarakan seminar.
8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, khususnya Jurusan Akuntansi, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga bagi penulis.

9. Pihak Biro Jurusan Akuntansi, Da Ari, Mama Loly, Ni Pit yang telah memberikan banyak bantuan dalam kelancaran urusan administrasi akademis penulis.
10. Partner seminar, Bang Nanda yang telah bersama sama menyeminarkan hasil penulisan skripsi pada Jumat 27 Agustus 2010.
11. Orang-orang yang mengajarkan arti sahabat sejati, Kezza Mahisa Agni (Ketua Genk), Riandy Hudial fadhli (Bokep / pimpinan klasmen/ Bintang Satu), Alfian Jamin Paney ("insomnia nih... huff"), Leo Wahyudi (Salah satu Agen dari Bokep Agency), Fuad Trendy Prima Putra (Ganteng "juragan e-Bay"), Kharina Eka Putra (Parecho Da Evans), Ilham Ahmadi (Ijon/runner up klasmen), Benny Helmi (Partner Badminton), Bg Angin (thanks pelajaran pengantar bridge 1 dan 2 bos), Mbot("Forza Inter"), Yendra Arici (Si kuning yang tersungkur), Handrey (La Vegchia Signora), Andre Prico (Brother).
12. Kawan-kawan seperjuangan "Akuntansi angkatan 2006" > Ela Melanie ( Mbaaa... I never walk alone), Putri Amy (identik dengan bawelnya), Raisa (semangat dan percaya diri lo wajib gw tiru tuh),Reysya, Ilma, Ilham, Reza ( Semangat za ), Dola, Silvy, Neng Tika, Fitri, Sari, Rio, Deny, Reny dan Tya (terima kasih telah meluangkan waktu untuk pengenalan Korea), Daniel, Boa, Memel, Vicky, Ike, Winda, Rahmi, Nadine, Kak Fika dan kawan-kawan seperjuangan lainnya yang namanya tidak memungkinkan untuk ditulis satu persatu disini. Atas semua waktu yang telah dilalui kurang lebih selama empat tahun, saya

ingin mengucapkan terima kasih, dan tetap semangat kawan!. Saya selalu bangga menjadi bagian dari angkatan ini. *We are "Young and Hopeful" Generation*

13. Uda dan Uni angkatan 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 , 2005 serta adek angkatan 2007 => Adam, Bayu, Dewa, Angga, Dika, adek-adek angkatan 2008=> Agnes, Doli, Taufik & Alvin ( salah satu *Rider "Ride Away to Solok"*), Okta, Teja, Gorby, Echa (ayo semangat cha), Ijun, Indah, Aconk, Cipaik, Dwinda Rahman, Ronal, Arif, Vicky, Melin, dan adek-adek angkatan 2009. Maaf jika ada yang belum disebut namanya.
14. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun baik untuk skripsi dan diri penulis sendiri. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, September 2010

Penulis



## **DAFTAR ISI**

	<b>HAL</b>
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM	
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Batasan Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB 2. LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kajian Teoritis SAKD	
2.1.1 Pengertian SAKD	10
2.1.2 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah	
Dalam Akuntansi	14
2.2 Dasar Akuntansi Keuangan Daerah	15
2.3 Penatausahaan Keuangan Daerah	17
2.4 Proses Akuntansi Keuangan Daerah	21
2.5 Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah	23

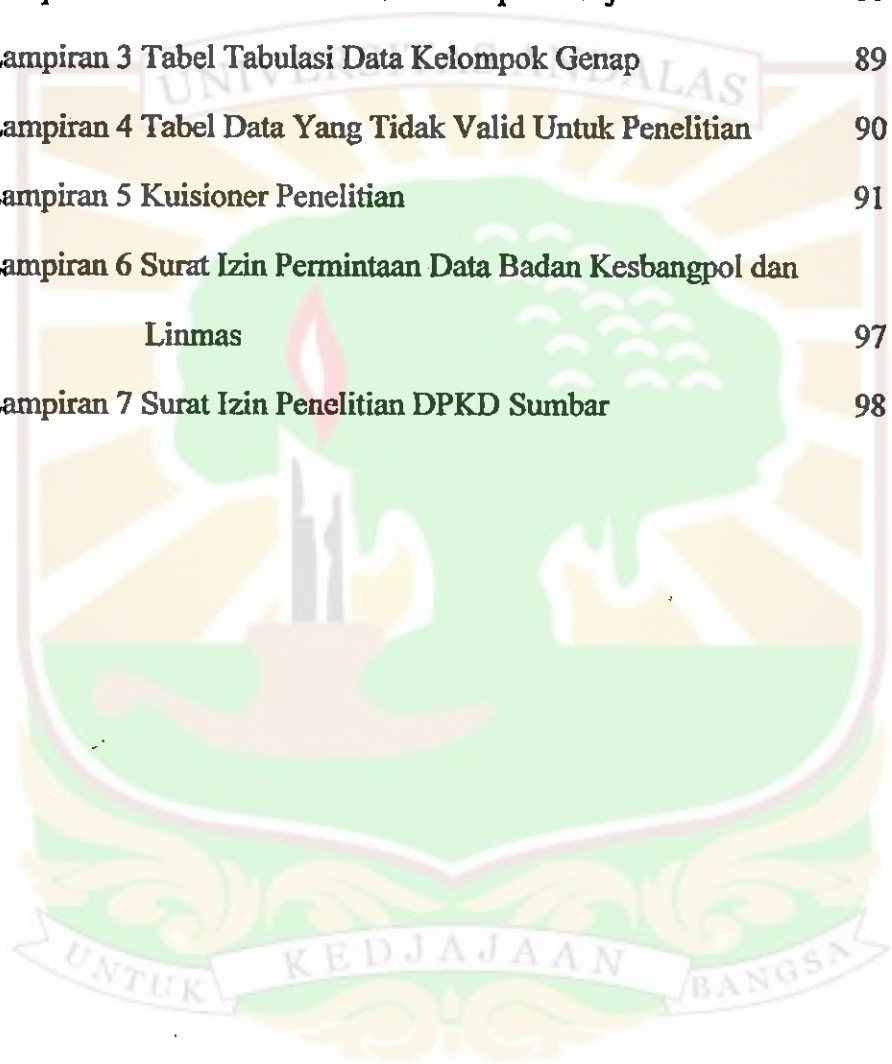
2.6 Kerangka Umum SAKD	30
2.7 Faktor Pendukung Akuntansi Keuangan Daerah	31
2.7 Review Penelitian Terdahulu	35
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Tempat dan Waktu penelitian	36
3.2 Teknik Pengumpulan data	37
3.3 Populasi dan Sampling	37
3.4 Indikator Variabel Penelitian	38
3.5 Penilaian dan Teknik Analisis Data	42
<b>BAB 4. PEMBAHASAN</b>	
4.1 Proses Pengumpulan Data	45
4.2 Proses Pengujian Data	45
4.3 Persepsi Terhadap Kesesuaian Penerapan SAKD	46
4.3.1 Persepsi Terhadap Penerapan Aspek Hukum SAKD	47
4.3.2 Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian antara Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi	49
4.3.3 Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Prosedur Akuntansi	52
4.3.4 Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	54
4.3.5 Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Elemen Laporan Keuangan dan Penggunaan Kode Rekening Akuntansi	56

4.3.6 Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Periode Akuntansi dan Kebijakan Umum Pelaporan Keuangan	58
4.4 Pemahaman Pegawai DPKD Sumbar tentang SAKD	62
4.4.1 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Karakteristik SAKD	64
4.4.2 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Prosedur Akuntansi	65
4.4.3 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi	66
4.4.4 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Laporan Keuangan Dalam SAKD	68
4.4.5 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Periode Akuntansi dan Perlakuan Depresiasi	69
4.5 Persepsi Pegawai DPKD Sumatera Barat Mengenai Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Membantu Kelancaran Penerapan SAKD pada DPKD	73
4.5.1 Persepsi Pegawai Terhadap Ketersediaan Sarana	74
4.5.2 Persepsi Pegawai Terhadap Ketersediaan Prasarana	76
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
5.3 Keterbatasan Penelitian	83



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
Lampiran 1 Tabel Tabulasi Data dan Uji Validasi Konstruk	87
Lampiran 2 Tabel Tabulasi Data Kelompok Ganjil	88
Lampiran 3 Tabel Tabulasi Data Kelompok Genap	89
Lampiran 4 Tabel Data Yang Tidak Valid Untuk Penelitian	90
Lampiran 5 Kuisisioner Penelitian	91
Lampiran 6 Surat Izin Permintaan Data Badan Kesbangpol dan Linmas	97
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian DPKD Sumbar	98



## **DAFTAR TABEL**

Judul	Hal
Tabel 4.1 Kesesuaian Penerapan Aspek Hukum SAKD	47
Tabel 4.2 Kesesuaian Penerapan antara Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi	50
Tabel 4.3 Kesesuaian Prosedur Akuntansi	52
Tabel 4.4 Kesesuaian Jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	54
Tabel 4.5 Kesesuaian Elemen Laporan Keuangan dan Penggunaan Kode Rekening Akuntansi	56
Tabel 4.6 Kesesuaian Periode Akuntansi dan Kebijakan Umum Pelaporan Keuangan	58
Tabel 4.7 Kesimpulan Terhadap Kesesuaian Penerapan SAKD pada DPKD Sumbar Dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006	60
Tabel 4.8 Latar Belakang Pendidikan Sampel Penelitian	63
Tabel 4.9 Pembagian Tanggung Jawab	63
Tabel 4.10 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Karakteristik SAKD	64
Tabel 4.11 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Prosedur Akuntansi	65
Tabel 4.12 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi	67
Tabel 4.13 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Laporan Keuangan dalam SAKD	68
Tabel 4.14 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Periode Akuntansi dan Perlakuan Depresiasi	69

Tabel 4.15 Kesimpulan Pemahaman Pegawai DPKD	71
Tabel 4.16 Ketersediaan Sarana	73
Tabel 4.17 Ketersediaan Prasarana	76
Tabel 4.18 Penilaian Sarana dan Prasarana	77



## **DAFTAR DIAGRAM**

Judul	Hal
DIAGRAM PIE 4.1 Kesesuaian Penerapan Aspek Hukum SAKD	49
DIAGRAM PIE 4.2 Kesesuaian Penerapan antara Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi	51
DIAGRAM PIE 4.3 Kesesuaian Prosedur Akuntansi	53
DIAGRAM PIE 4.4 Kesesuaian Jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	55
DIAGRAM PIE 4.5 Kesesuaian Elemen Laporan Keuangan dan Penggunaan Kode Rekening Akuntansi	57
DIAGRAM PIE 4.6 Kesesuaian Periode Akuntansi dan Kebijakan Umum Pelaporan Keuangan	59
DIAGRAM PIE 4.7 Kesesuaian Penerapan SAKD Pada DPKD Sumbar	62
DIAGRAM PIE 4.8 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap SAKD	65
DIAGRAM PIE 4.9 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Prosedur Akuntansi	66
DIAGRAM PIE 4.10 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi	67
DIAGRAM PIE 4.11 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Laporan Keuangan Dalam SAKD	69
DIAGRAM PIE 4.12 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Periode Akuntansi dan Perlakuan Depresiasi	70
DIAGRAM PIE 4.13 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap SAKD	72

DIAGRAM PIE 4.14 Ketersediaan Sarana 75

DIAGRAM PIE 4.10 Ketersediaan Prasarana 78





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Era desentralisasi ditandai dengan otonomi daerah dan otonomi luas, presiden bukan penanggung jawab untuk segala masalah. Desentralisasi membawa konsekuensi penyebaran dan pembagian tanggung jawab kepada kepala daerah. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, bahkan otonomi luas untuk Aceh dan Papua, tidak ada lagi ketergantungan mutlak daerah dengan pusat.

Jika pada era sebelum reformasi, semua bergantung pada pemerintah pusat, di era desentralisasi semuanya dibalik. Perubahan dan pembagian tanggung jawab itu diharapkan dipahami seluruh rakyat, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Pengertian pemerintah pusat disini adalah presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Untuk itu, sangat diperlukan panduan yang menjelaskan mana kewajiban dan tanggung jawab pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.<sup>1</sup>

Mardiasmo (2002) menyampaikan secara umum bahwa reformasi sektor pemerintah mencakup perubahan format lembaga, dan pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga pemerintahan di daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi, yaitu menciptakan *good governance* dapat tercapai. Ada banyak sekali definisi tentang *good governance*. Definisi yang paling umum adalah pemerintahan yang baik. Sementara World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sebagai aktivitas memerintah, *good governance* memenuhi empat aspek. Pertama, prinsip keadilan sosial, termasuk di dalamnya sistem pengadilan yang independen dan tidak pandang bulu. Kedua, kebebasan ekonomi beserta pemerataan hasil pembangunan. Ketiga, kemajemukan politik

---

<sup>1</sup> Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, buku 4 Prosedur Akuntansi, Pokja IV, Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

yang ditandai dengan partisipasi masyarakat dan prinsip *equity* (kesamaan). Sementara keempat, adalah prinsip akuntabilitas pemerintah. Sementara itu transparansi diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat diberi hak untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam pemerintahan, dimulai dari kebijakan yang digunakan, langkah kongkrit yang telah diambil pemerintah serta sumber daya baik fisik ataupun finansial yang digunakan pemerintah dalam menyokong langkah dan kebijakan tersebut. Akuntabel adalah bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap segala tindakan yang telah dijalankan untuk mencapai visi utama pemerintah, baik yang berhasil ataupun gagal.

Nofria Melsi (2005:2) menggambarkan bentuk hubungan antara transparansi dan akuntabilitas melalui Teori Keagenan (*Agency Theory*). Dalam Teori Keagenan disebutkan bahwa senantiasa terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Masyarakat merupakan principal yang memiliki hak sepenuhnya atas sejumlah sumber daya yang digunakan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai agen yang mengemban amanah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya tersebut untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu principal perlu mengetahui dan mengendalikan tindakan agen agar tetap sejalan dengan kepentingan principal.

Kedua hal diatas dapat dipenuhi melalui sistem pengelolaan yang memadai, oleh karena itu pemerintah sebagai agen harus mengelola segala sumberdaya untuk menjalankan visi utama pemerintah itu sendiri. Menurut

Nofria Melsi dalam Abdul Halim (2001:9), manajemen daerah terdiri dari dua unsur, yaitu :

1. Tata Usaha Umum

Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan serta kegiatan dokumentasi lainnya.

2. Tata Usaha Keuangan

Tata usaha keuangan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu, serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual dibidang keuangan.

La Ode Hasiara (2009) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dimensi reformasi lembaga pemerintah daerah dan lembaga di bawahnya dalam rangka pemberian pelayanan publik dengan memberikan otonomi dan desentralisasi tanggungjawab pemerintah daerah lebih diarahkan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat secara umum tertuang dalam Permendagri No. 13 tahun 2006.

Berbagai pendapat itu telah direspon oleh pemerintah dengan cepat. Pemerintah dengan cepat merencanakan serta mengesahkan pembentukan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kedua ketetapan



diatas memberi kuasa dan wewenang penuh kepada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengelola daerah sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, juga membentuk suatu pola hubungan yang baru dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Nofria Melsi, 2005:1).

Disamping itu, akibat era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.<sup>2</sup> Sistem nantinya akan sangat membantu pemda dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah yakni membuat laporan keuangan daerah yang bersangkutan dan dapat pula dipertanggungjawabkan. Selain untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah, sistem ini juga digunakan sebagai alat kontrol kerja Pemda, yakni apakah sudah sesuai dengan yang dijelaskan dalam pedoman utama akuntansi keuangan daerah yang tertuang dalam Permendagri No. 13 tahun 2006. Peraturan ini merupakan pembaharuan dari Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Pemerintah sebelumnya juga sudah menyempurnakan UU.No. 22 Tahun 1999, dan disempurnakan dengan UU.No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan UU.No.25 Tahun 1999, sebagaimana telah disempurnakan dengan UU.No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah yang diikuti dengan pengawasan atas penyelenggaraan kedua Undang-undang tersebut. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut adalah desentralisasi.

---

<sup>2</sup> Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001



Sistem yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dan sebagai kontrol, apakah segala kegiatan pemerintah daerah telah sesuai dengan pedoman yang mengatur seperti Permendagri No. 13 Tahun 2006. Selain dari pada itu, sisi pegawai pemerintah daerah dalam penetapan sistem dan pembuat laporan perranggungiawaban juga wajib diperhatikan, bagaimana pandangan para pegawai terhadap sistem akuntansi yang berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERSEPSI PEGAWAI DPKD SUMATERA BARAT TERHADAP KESESUAIAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA DPKD SUMATERA BARAT”**

## **I. 2 Perumusan Masalah**

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi para pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dan pedoman lainnya ?
2. Seberapa besar tingkat pemahaman para pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana persepsi para pegawai terhadap kualitas sarana dan prasaran yang terdapat dalam dinas tersebut ?

### **I. 3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi para pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dan pedoman lainnya.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman para pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui persepsi para pegawai terhadap kualitas sarana dan prasarana yang terdapat dalam dinas tersebut.

### **I. 4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan dasar atau rujukan untuk penelitian yang akan datang terkait dengan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai tambahan pengetahuan di bidang pendidikan.
3. Bagi kalangan mahasiswa dan akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dalam ilmu pengetahuan.
4. Dalam proses penelitian ini juga memberikan manfaat secara pribadi, yakni menambah wawasan penulis di bidang akuntansi pemerintahan.

## **I. 5 Batasan Masalah**

Pada penulisan skripsi serta penelitian yang dilakukan, peneliti hanya membatasi lingkup penelitian di bidang akuntansi keuangan daerah, yang diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, revisi pada Permendagri No. 59 tahun 2007, serta panduan-panduan lain yang sejalan. Sehingga penilaian terhadap persepsi para pegawai DPKD Sumatera Barat tersebut merujuk dari Permendagri No. 13 tahun 2006, serta panduan-panduan lain yang sejalan.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Bab satu berisikan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua membahas tinjauan literatur tentang teori-teori yang berkaitan dengan sistem, akuntansi, keuangan daerah, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bab ini juga berisi tinjauan umum dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai salah satu referensi penulis menjalankan penelitiannya.

Bab tiga menguraikan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini serta cara cara penulis mengumpulkan data.

Pada bab empat penulis memfokuskan pada analisis terhadap data yang dikumpulkan serta dilengkapi dengan pembahasan yang menyajikan uraian

mengenai hasil penelitian yang mencakup sampel penelitian, dan pengujian data.

Bab lima adalah penutup terdiri dari beberapa bagian yakni kesimpulan, saran serta keterbatasan penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban dari perumusan masalah serta ringkasan singkat dari bagian hasil dan pembahasan. Saran merupakan tambahan yang ditujukan bagi pihak lain yang bertujuan untuk mengangkat kasus yang serupa. Keterbatasan dari penelitian ini akan menjadi satu bagian pembahasan dalam bab ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **II. 1 Kajian Teoritis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

##### **II. 1. 1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Banyak kalangan yang mempunyai definisi tersendiri mengenai sistem akuntansi keuangan baik daerah, sistem disini bukan diartikan sebagai suatu perangkat lunak yang biasa disebut sebagai sistem informasi, namun lebih diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang mendasari sesuatu.

Sebuah sistem adalah kumpulan dari unsur-unsur yang saling terkait, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem biasanya selalu memiliki tiga unsur utama; input, proses, dan output (Amsal Djunid, 1999:5).

Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Didalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat (Abdul Halim, 2002:42).

Sistem adalah suatu kerangka dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutanurutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan adanya pelakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (W. Gerald Cole dalam Baridwan, 1971).



Sementara itu menurut Steven A. Moscovice dalam Baridwan, 1971, sistem adalah suatu kesatuan (entity) yang terjadi dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan terdahulu. Sedangkan menurut (Mulyadi, 1993) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi (Howard F. Sletttler dalam Baridwan, 1971).

Sementara pendapat lain mengatakan, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi akuntansi sektor publik ( Indra Bastian dan Gatot Supriyanto, 2002:3).

Menurut Syamsul (1992), sistem akuntansi berasal dari dua buah kata yaitu sistem yang berarti suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan akuntansi yang artinya suatu aktifitas jasa yang memberikan informasi kuantitatif, terutama bersitat keuangan,

mengenai kesatuan ekonomi dengan maksud agar berguna untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku ( Mamesah dalam Abdul Halim, 2002:19).

Keuangan daerah dapat pula diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD ( Tjahya Supriana, 1993:174).

Dalam PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

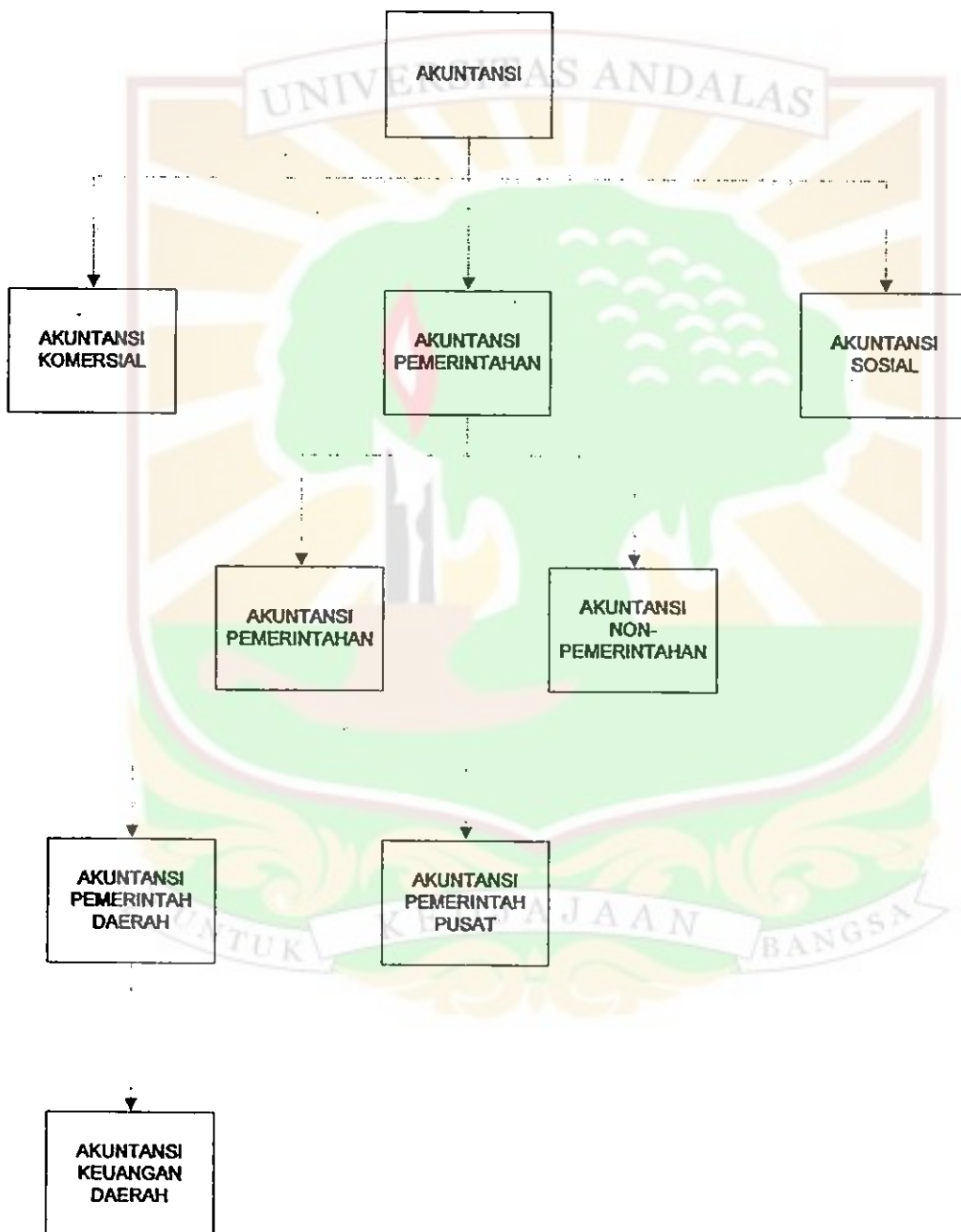
“ Yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Akuntansi keuangan daerah dapat pula didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten, atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Abdul Halim, 2002:35).

Dari banyak defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah kumpulan dari unsur-unsur yang saling terkait atau jaringan akuntansi yang terdiri dari 1. *input*, yang berupa dokumen, formulir atau bukti-bukti transaksi, 2. *Proses*, pengolahan input tersebut dengan menggunakan satu prosedur yang handal (identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan), dan 3. *Output*, yang berupa laporan keuangan yang digunakan oleh Pemda ataupun kalangan lain diluar pemerintah untuk pengambilan keputusan. Sementara itu bagi Pemda sendiri SAKD ini digunakan untuk penyelenggaraan desentralisasi dan dekonsentrasi.

## II. 1. 2 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Akuntansi

Abdul Halim (2002:30) menggambarkan posisi akuntansi keuangan daerah dalam kesatuan besar akuntansi



Pembagian akuntansi juga dapat didasari atas tujuan laporan keuangan yang dihasilkan, akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan untuk pihak-pihak diluar organisasi pembuat laporan keuangan. Sementara itu, akuntansi manajemen menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan bagi pihak manajemen organisasi itu sendiri. Namun kedua akuntansi ini sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Menurut hierarkinya, akuntansi keuangan daerah adalah bagian dari akuntansi keuangan, tetapi akuntansi keuangan daerah juga digunakan sebagai pengelola atau manajemen keuangan daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah dapat dikategorikan juga sebagai akuntansi manajemen ( Mamesah dalam Abdul Halim, 2002:31). Jika dilihat dari pengguna utama laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemda maka akuntansi keuangan daerah ini dapat dikategorikan sebagai akuntansi keuangan ataupun akuntansi manajemen, karna laporan keuangan yang dihasilkan ditujukan untuk manajemen pemerintah dan juga untuk masyarakat luas dan pihak lain diluar pemerintahan.

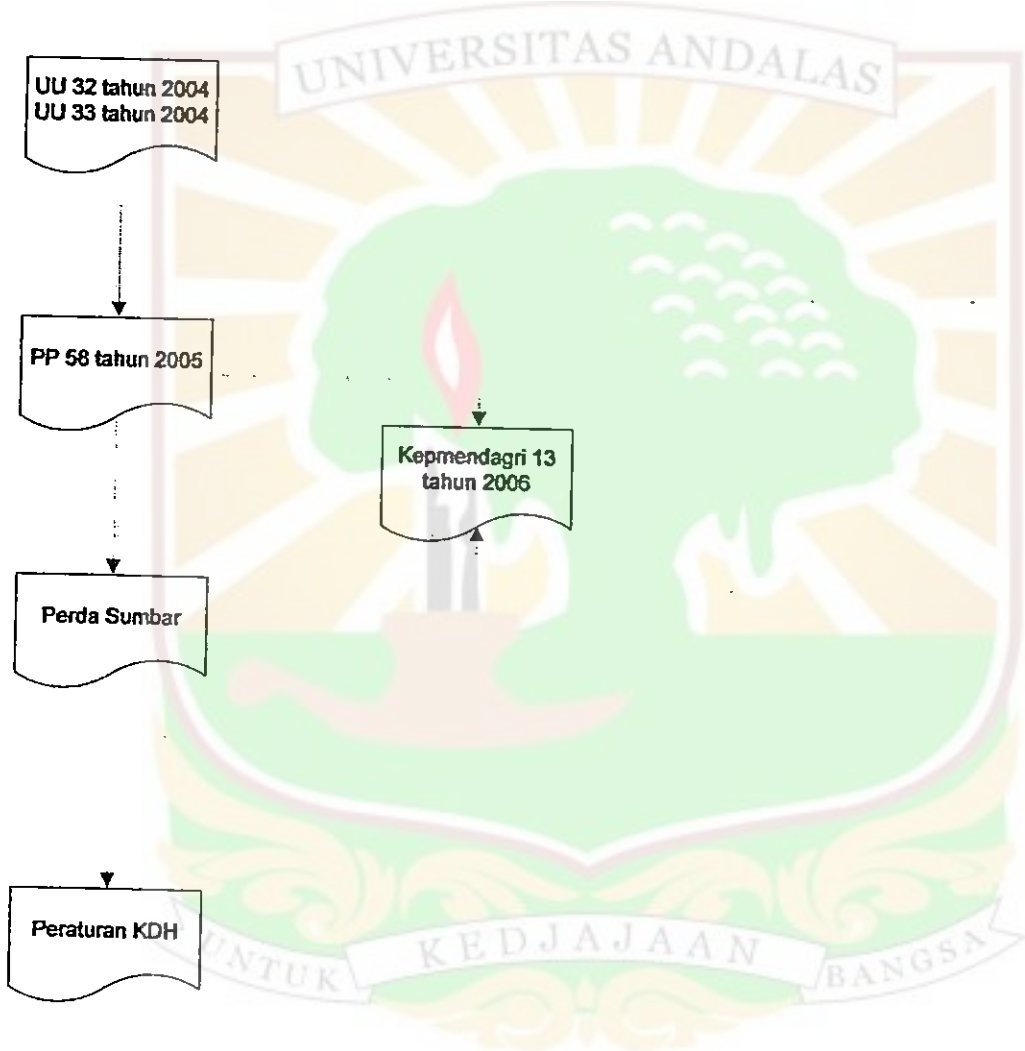
## **II. 2 Dasar Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem pengelolaan keuangan daerah pada SKPD diatur oleh sebuah peraturan baku yang ditetapkan oleh perundang-undangan. SAKD ini dibentuk oleh kebijakan dan keputusan kepala daerah yang merujuk kepada Perda. Sementara itu Perda menetapkan kebijakan tersebut melalui ketetapan yang tertara dalam PP no 58 tahun 2005. Kedua hal yakni antara Perda yang



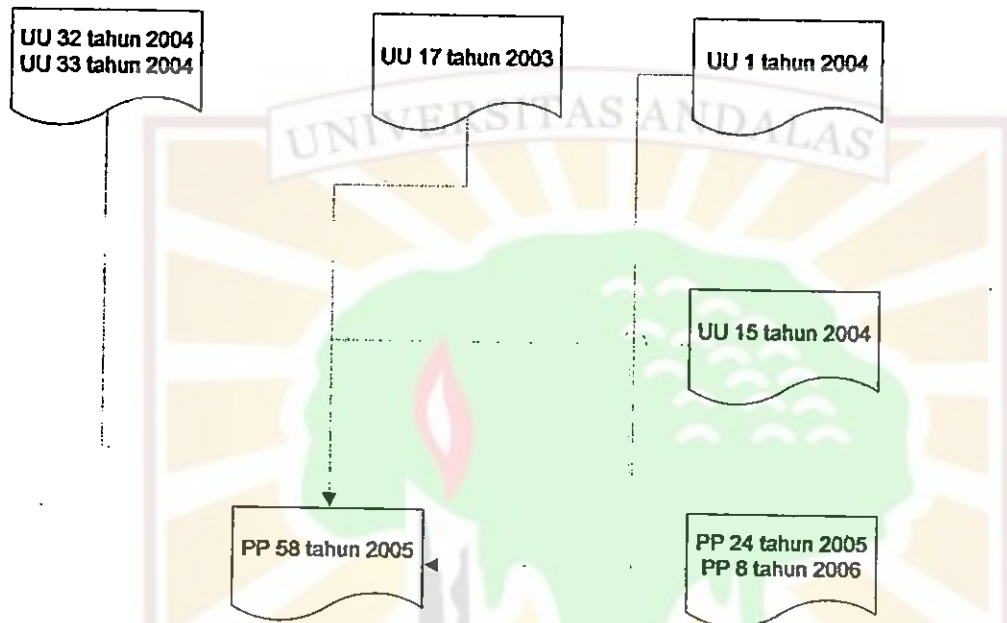
ditetapkan oleh Pemda dan penetapan yang tertera dalam PP no 58 tahun 2005 harus sejalan dengan Permendagri no 13 tahun 2006. Ketetapan yang tertera dalam PP no 58 tahun 2005 dibuat berdasarkan UU 32 dan 33 tahun 2004.

Skema dari alur penetapan SAKD adalah sebagai berikut:



PP 58 tahun 2005 ditetapkan sebagai penetapan umum untuk PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) dengan banyaknya rujukan dari UU dan PP terdahulu.

Berikut skema penetapan PP 58 tahun 2006 menjadi landasan atau dasar utama sistem pengelolaan daerah atau yang biasa disebut *omnibus regulation*



### II.3 Penatausahaan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan bagian dua dalam landasan teori, maka Fungsi ini dapat dikaitkan dengan penatausahaan dalam Pemda. Fungsi bendahara dalam DPKD adalah mengatur arus keluar masuknya kas dari rekening BUD untuk keperluan tertentu. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh para manajer yang berguna untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas.

Terdapat empat bagian yang menerima aliran kas masuk ke pemerintah daerah yakni :

1. Bendahara penerimaan

2. Bendahara penerimaan pembantu
3. Bank kas umum daerah
4. Bank lain lembaga keuangan

Jika ada aliran kas masuk melalui salah satu dari empat bagian diatas maka bendahara atau bank yang menerima kas tersebut wajib mengeluarkan STS (Surat Tanda Setoran), SKPD, dan Surat tanda bukti. Setelah itu ketiga slip diatas akan diserahkan ke penatausahaan penerimaan dan penatausahaan penerimaan pembantu. Selanjutnya penatausahaan penerimaan pembantu akan mengeluarkan SPJ penerimaan pembantu yang kemudian akan diserahkan ke penatausahaan penerimaan. Pada tahap akhir, penatausahaan penerimaan akan mengeluarkan SPJ penerimaan.

### 3. 1 Dokumen pokok penatausahaan pengeluaran

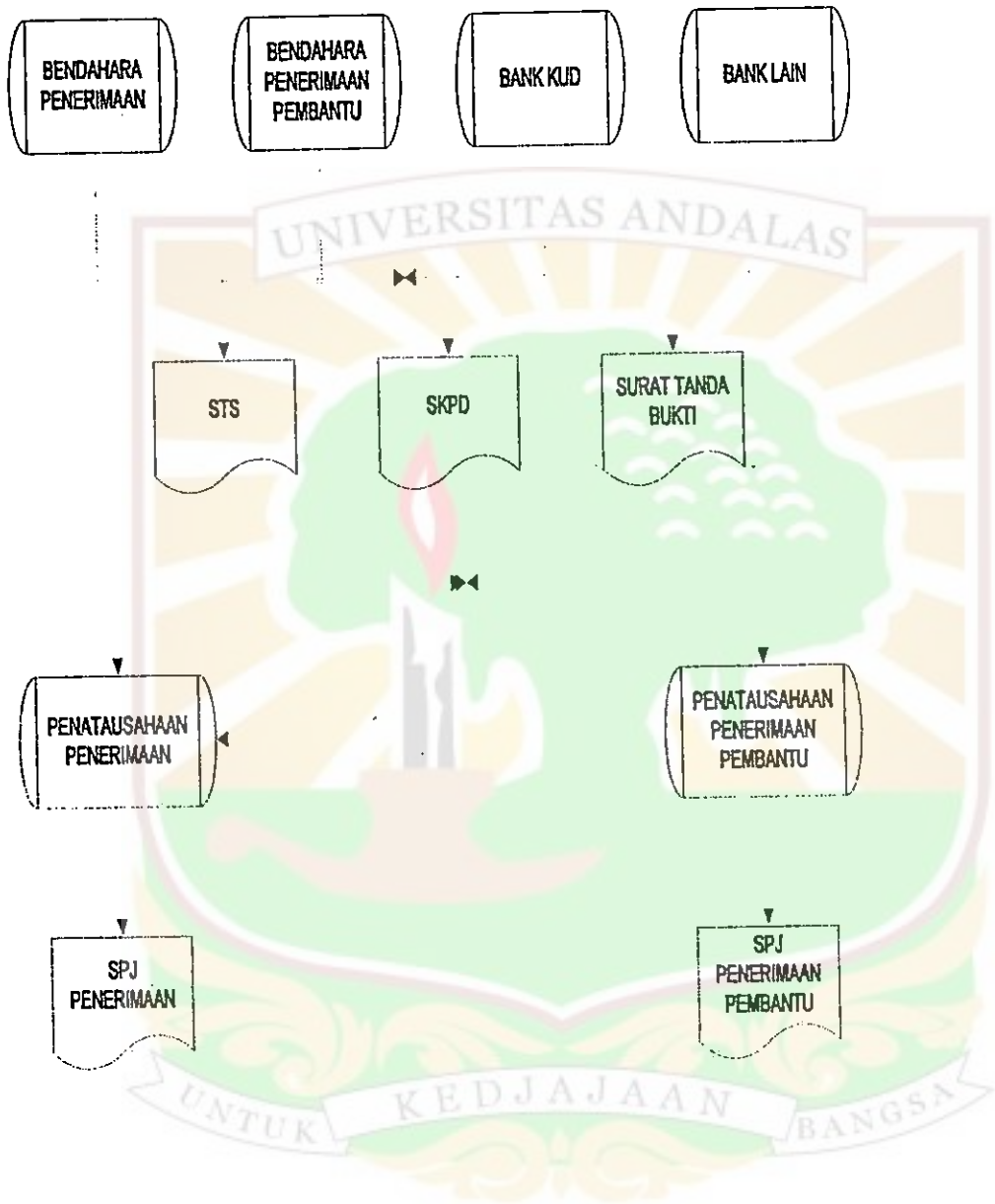
Jika pemerintah daerah berniat menggunakan suatu dana yang terdapat dalam pos APBD maka siklus yang dilakukan adalah PPKD menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang kemudian diajukan ke bagian bendahara. Setelah dikaji lebih lanjut maka bendahara akan menyiapkan SPP-LS atau Surat Permintaan Pembayaran Langsung, ini adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. PPTK akan mengeluarkan SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung). SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran atau kuasanya untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas beban

pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. Pada tahap akhir BUD (bendahara umum Daerah) akan menerbitkan SP2D.

Sementara itu jika Perda memerlukan ganti uang, tambah uang atau uang persediaan, maka akan diajukan SPP-UP, SPP-TU atau SPP-GU. SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka untuk kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Sementara untuk SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SKEMA FUNGSI PENGARAHAN

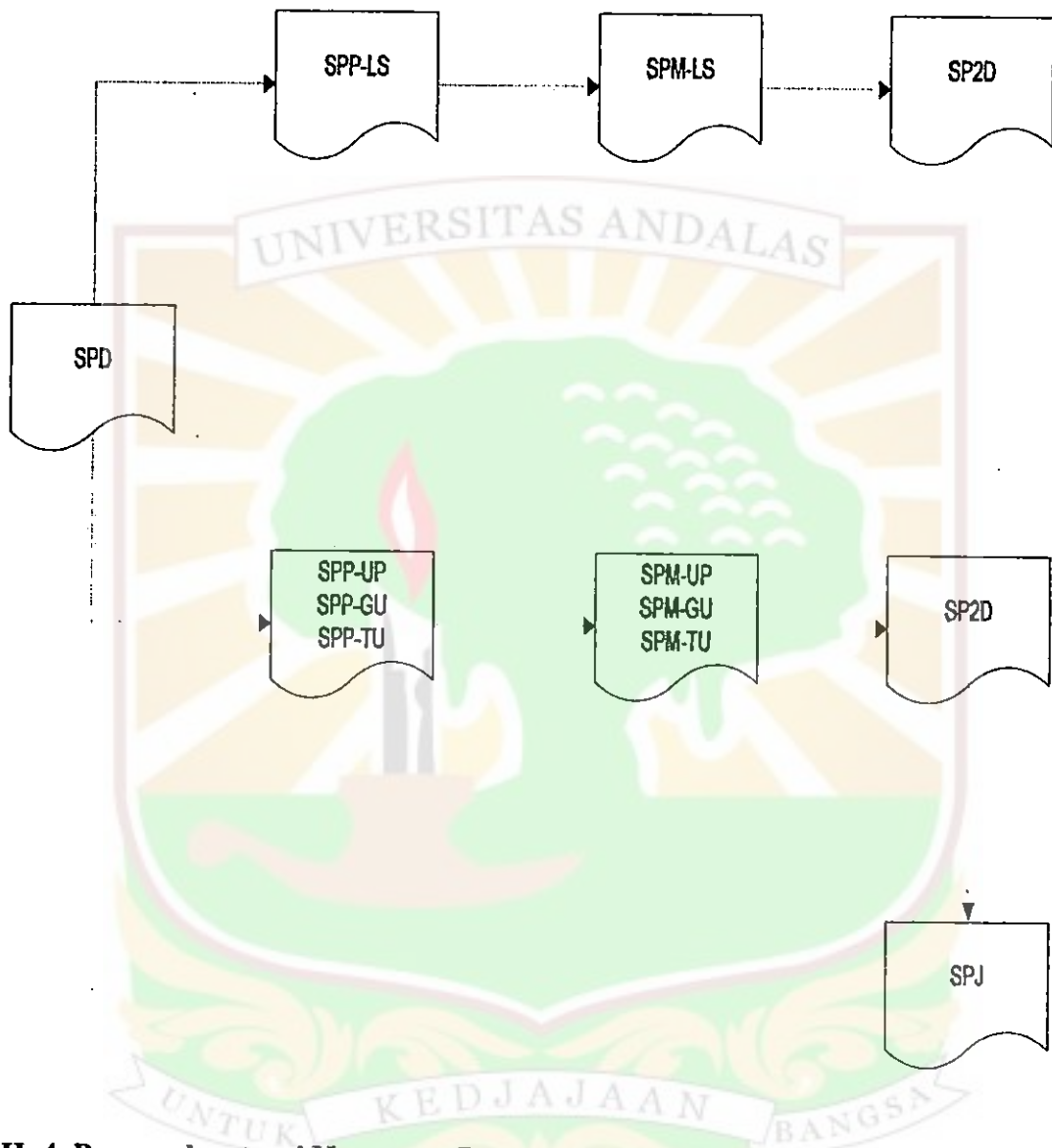
PENERIMAAN





## SKEMA FUNGSI PENGARAHAN

### PENGELUARAN



#### II. 4. Proses akuntansi Keuangan Daerah

Pencatatan pada Perda sama dengan proses akuntansi pada umumnya. Prosesnya dimulai dari Pengumpulan dokumen transaksi. Dokumen transaksi terdiri dari Bukti penerimaan kas PAD, perimbangan dan lain-lain, bukti pengeluaran kas SPMU, dan SPJ. Selanjutnya dokumen tersebut dicatat dalam buku jurnal dan buku pembantu. Buku jurnal berisikan Jurnal penerimaan kas,

jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum. Selanjutnya pencacatan memasuki tahap buku besar, proses disini termasuk didalamnya rekapitulasi buku besar kumpulan rekening. Proses terakhir adalah penyusunan laporan keuangan, yang berisikan laporan arus kas, neraca, dan laporan realisasi APBD.

Pada akuntansi keuangan daerah, pemerintah daerah mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan PP 24/2009 menyusun system akuntansi pemerintah daerah, lalu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

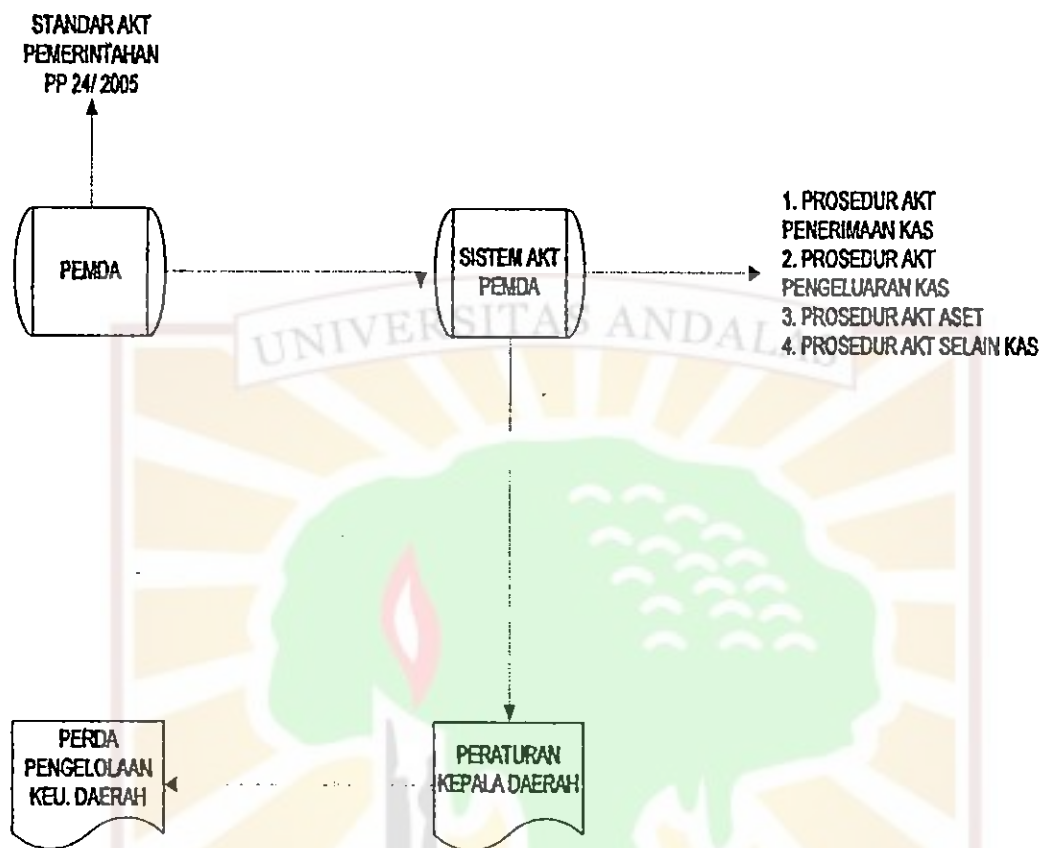
Laporan pertanggung jawaban APBD terdiri dari :

1. Laporan realisasi APBD
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi pemerintahan (PP No.24/2005).

#### SKEMA FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN





Pada fase pengawasan atau pengendalian hanya dilakukan evaluasi menyeluruh dari hasil kerja tahun tertentu dengan membandingkan PBD yang dianggarkan dengan yang direalisasikan, yang mewajibkan Pemda untuk membuat laporan hasil evaluasi.

## II. 5 Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan pada Pemda berbeda dengan pada manufaktur atau perusahaan dagang. Prosedur sistem akuntansi keuangan pada SKPD<sup>3</sup> terdiri dari :

<sup>3</sup> PP No 58 tahun 2005 pasal 98 dan Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 233.

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Aset Tetap.

Perbedaan utama yang tampak adalah pada SKPD tidak terdapat prosedur akuntansi untuk pengakuan laba atau rugi. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang diadakan oleh Pemda tidak untuk mencari laba atau rugi, setiap kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan masyarakat.

Sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD meliputi beberapa hal, antara lain :

1. Sistem atau Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD.<sup>4</sup>

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam angka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>5</sup>

Pelaksana pada tingkatan akuntansi penerimaan kas ini terbagi atas dua bagian, yakni pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD, sementara itu pada bagian SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-bagian akuntansi.

---

<sup>4</sup> Permendagri No. 13 Tahun 2006 Paragraf 1.

<sup>5</sup> Permendagri No. 13 Tahun 2006 Paragraf 1 Pasal 241.

Dokumen yang digunakan pada bagian akuntansi penerimaan kas ini

adalah :

- STS
  - Nota Kredit
  - Bukti Transfer
  - Dokumen Lainnya
- Catatan yang digunakan dalam bagian ini terdiri dari tiga bagian, yakni:

- Buku Jurnal Penerimaan Kas

- Buku Besar

- Buku Besar Pembantu

Dokumen yang dihasilkan juga terbagi berdasarkan pelaksanaan pada bagian ini, sehingga terdapat dua dokumen yang dihasilkan.

- SKPD

- 1. Neraca

- 2. Laporan Realisasi Anggaran

- 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

- SKPKD

- 1. Neraca

- 2. Laporan Realisasi Anggaran

- 3. Laporan Arus Kas

- 4. Catatan Atas Laporan Keuangan



## 2. Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam angka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer

Pelaksana pada tingkatan akuntansi pengeluaran kas ini sama seperti akuntansi penerimaan kas, yakni pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD, sementara itu pada bagian SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-bagian akuntansi.

Dokumen yang digunakan pada bagian akuntansi pengeluaran kas ini adalah :

- SP2D
- SPJ
- Nota Kredit
- Bukti Transfer
- Dokumen Lainnya

Catatan yang digunakan dalam bagian ini terdiri dari tiga bagian, yakni:

- Buku Jurnal Penngeluaran Kas
- Buku Besar
- Buku Besar Pembantu

Dokumen yang dihasilkan juga terbagi berdasarkan pelaksana pada bagian ini, sehingga terdapat dua dokumen yang dihasilkan.

- **SKPD**

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

- **SKPKD**

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

### 3. Akuntansi Aset Tetap

Prosedur akuntansi aset tetap diartikan sebagai serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan / atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan / atau kejadian aset tetap pada SKPD dan / atau SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

Pelaksana pada tingkatan akuntansi aset tetap ini terdapat dua bagian, yakni pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD, sementara itu pada bagian SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-bagian akuntansi.

Dokumen yang digunakan pada bagian akuntansi aset tetap ini adalah :

- **Bukti Memorial**

Catatan yang digunakan dalam bagian ini terdiri dari tiga bagian, yakni:

- Buku Jurnal Umum
- Buku Besar
- Buku Besar Pembantu

Dokumen yang dihasilkan juga terbagi berdasarkan pelaksana pada bagian ini, sehingga terdapat dua dokumen yang dihasilkan.

- SKPD
  1. Neraca
  2. Laporan Realisasi Anggaran
  3. Catatan Atas Laporan Keuangan
- SKPKD
  1. Neraca
  2. Laporan Realisasi Anggaran
  3. Laporan Arus Kas
  4. Catatan Atas Laporan Keuangan

#### 4. Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi aset tetap diartikan sebagai serangkaian proses .. mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan / atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan / atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan / atau SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

Pelaksana pada tingkatan akuntansi selain kas ini sama seperti prosedur akuntansi yang lain, yakni pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD, sementara itu pada bagian SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-bagian akuntansi.

Dokumen yang digunakan pada bagian akuntansi selain kas ini adalah :

- **Bukti Memorial**

Catatan yang digunakan dalam bagian ini terdiri dari tiga bagian, yakni :

- **Buku Jurnal Umum**
- **Buku Besar**
- **Buku Besar Pembantu**

Dokumen yang dihasilkan juga terbagi berdasarkan pelaksana pada bagian ini, sehingga terdapat dua dokumen yang dihasilkan.

- **SKPD**
  1. Neraca
  2. Laporan Realisasi Anggaran
  3. Catatan Atas Laporan Keuangan
- **SKPKD**
  1. Neraca
  2. Laporan Realisasi Anggaran
  3. Laporan Arus Kas
  4. Catatan Atas Laporan Keuangan

## II. 6 Kerangka Umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah<sup>6</sup>

1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (*software*) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan Jurnal yang sekaligus *diposting* kedalam Buku Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan Kerja.
4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban Satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu *copy* dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen, satu *copy* untuk arsip Unit Perhitungan. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realiasi APBD pada suatu periode.

---

<sup>6</sup> Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).



## II. 6 Faktor- Faktor Pendukung Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah

Adapula beberapa faktor selain sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri yang sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya Pemda menjalankan tugasnya, antara lain :

### 1. Personalia

Banyak atau tidaknya jumlah personalia yang bekerja dalam satu kesatuan organisasi pemda tidak menjamin keberhasilan pemda tersebut dalam menjalankan tugasnya, namun harus pula didukung dengan kualitas yang dimiliki oleh para personalia tersebut sehingga dapat menjamin hasil kerja yang diberikan oleh personalia tersebut. Personalia tersebut terdiri dari penyusunan (staffing) serta penarikan ( recruitment), latihan dan pengembangan, dan penempatan dan pemberian otorisasi.<sup>7</sup> Dalam hal ini pemda seharusnya memiliki kriteria tertentu dalam penyeleksian personalia seperti mental emosional, fisik, serta intelegensi dan pemahaman terhadap prosedur utama keuangan daerah melalui analisa jabatan. Melalui analisa jabatan ini, pemda dapat menempatkan personalia tertentu di bidang yang sesuai dengan keahlian, sehingga tidak terjadi campur aduk, dimana personalia tertentu ditempatkan bukan karena lulus klasifikasi kriteria pemda, namun karna adanya faktor tertentu seperti KKN. Dalam beberapa literatur manajemen, dikatakan bahwa personalia merupakan bagian utama dari fungsi manajemen, dimana personalia akan membantu oraganisasi, dalam hal ini pemda menjalankan serta mencapai tujuan utama mereka.

---

<sup>7</sup> Dr. T. Hani Handoko, M.B.A, *Manajemen*, edisi kedua, PT BPFE-Yogyakarta, 2001. Hal. Xxl.

## 2. Sarana dan Prasarana

Faktor lain yang juga menyokong penerapan SAKD di pemda adalah faktor saran dan prasarana. Sarana dan prasarana ini dapat memudahkan personalia menjalankan tugas mereka sehingga sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja. Contoh mobil, komputer, pulpen, kertas, tinta printer, dan lain- lain. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. contoh gedung kantor.

Secara garis besar, berikut adalah sarana dan prasaran umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pusat :

Kendaraan Roda 4 (empat)
Kendaraan Roda 2 (dua)
Komputer
Printer
Meja Eselon III
Meja Eselon IV
Meja Staf
Meja Komputer
Kursi Eselon III
Kursi Eselon IV
Kursi Lipat

Meja/Kursi Tamu
Filing Kabinet
Lemari Buku untuk Arsip
Lemari Besi
Rak Besi
AC
Pesawat Tilpon
Note Book
Brangkas
Mesin Ketik Manual
Kursi Staf

### 3. Sistem Informasi Keuangan Daerah<sup>8</sup>

Selain hal yang terkait dengan proses perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, kinerja dan kerja DPKD juga dipengaruhi oleh hal yang bersifat membantu secara tidak langsung. Suatu sistem yang diterapkan atau digunakan dalam organisasi DPKD mempunyai andil yang sangat penting dalam membantu kelancaran kerja DPKD itu sendiri.

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai karakteristik sebagai berikut :

<sup>8</sup> Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

## **1. Centralized Database**

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) merupakan sistem akuntansi yang berbasis relational database dengan pola database tersentralisir (centralized single database) yang dapat diakses oleh seluruh unit. Dengan digunakannya centralized single database maka pengelolaan database ini lebih mudah karena kesamaan master table referensi selalu terjamin dan database selalu dalam kondisi normal. Selain itu penggunaan single database ini tidak membutuhkan proses upload dan download karena seluruh user terhubung ke database melalui Local Area Network (LAN). Dengan centralized single database, maka para user dapat berbagi penggunaan data, sehingga untuk data yang sama, user tidak perlu menginput kembali. Namun demikian kewenangan user atas suatu data dalam tabel dibatasi sesuai dengan tugas pokok user tersebut, sehingga tidak seluruh user berhak mengubah record dalam suatu tabel.

## **2. Distributed Access With Group of Users**

Database Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tersentralisir di Unitunit Keuangan, namun database ini dapat diakses oleh seluruh user yang punya otorisasi. Owner database ini adalah Unit Perbendaharaan, sehingga unit ini mempunyai privilege tertinggi. User yang lain diberi hak membaca atau mengupdate tabel-tabel tertentu. Misalkan Unit Perlengkapan diberi hak membaca tabel SPMU tapi tidak dapat mengupdatenya, namun Biro Perlengkapan ini diberi hak membaca dan mengupdate tabel rincian aset tetap. Dengan distributed access ini

maka Kepala Daerah setiap saat dapat memantau perkembangan realisasi APBD.

### **3. Wide Area Network (WAN) dan Local Area Network (LAN)**

Seluruh user atau pengguna Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhubung dalam suatu jaringan WAN. WAN merupakan jaringan yang menghubungkan antar LAN. Dengan WAN dan LAN ini seluruh user dapat mengakses Database SIAKD yang terletak di Server. Untuk kepentingan security maka seluruh transfer data antar LAN harus dalam kondisi encrypted. Untuk setiap koneksi antar LAN juga digunakan firewall sehingga hanya user yang punya otorisasi yang dapat masuk ke sistem.

## **II. 7 Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai dasar pemikiran dan referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Nofria Melsi yang dilakukan pada tahun 2005. Penelitian tersebut berjudul “ Penerapan SAKD pada Pemda Kabupaten Padang Pariaman”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kesimpulan skor rata-rata penerapan SAKD Pemda Kabupaten Padang Pariaman sebesar 74,21%.



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **III.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dari bulan Mei hingga Juni 2010. Penelitian ini difokuskan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat, dimana DPKD itu sendiri merupakan suatu perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, DPKD merupakan bagian dari organisasi atau unsur pemerintahan daerah. Tugas utama dari DPKD ini adalah melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah secara komprehensif dan aktivitas kebendaharaan umum lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD<sup>9</sup>. Tertera dalam pasal 56 UU ini pula yang menjelaskan bahwa satuan kerja perangkat keuangan daerah lainnya menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah dan menyusun serta menyampaikan laporan keuangan masing-masing berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan penjelasan dari UU No. 1 Tahun 2004 pasal 56 tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan pada 2 bagian utama dalam DPKD, yakni :

1. Bagian Penganggaran,
2. Bagian akuntansi.

---

<sup>9</sup> UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 56

### **III.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui dua cara, yakni :

1. Penyebaran quisioner yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti, yang kemudian akan diisi oleh responden.
2. Quisioner yang disebarkan merupakan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofria Melsi pada tahun 2005, dengan adanya sedikit perubahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kebutuhan penelitian.
3. Melakukan wawancara untuk menguji validitas data yang diisi oleh responden dalam quisioner.

### **III.3 Populasi dan Sampling**

- **Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi DPKD provinsi Sumatera Barat, serta seluruh pegawai yang terdapat didalamnya.

- **Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh pada tahun 2001, yakni menggunakan teknik purposive dengan asumsi bahwa seluruh sampel yang dipilih adalah yang sesuai dengan tujuan utama penelitian, dimana seluruh pegawai yang bekerja dalam bagian penganggaran, BUD, serta Akuntansi adalah objek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan di

DPKD Provinsi Sumatera Barat ini dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, serta kesadaran para pegawai DPKD terhadap pentingnya kesesuaian SAKD.

### **III.4 Indikator Variabel Penelitian**

Variabel utama atau independen dalam penelitian ini adalah Persepsi Pegawai DPKD Sumatera Barat Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Sementara itu, variabel lainnya adalah Pemahaman Pegawai DPKD Sumatera Barat, serta Persepsi Pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana sebagai variabel penguat.

#### **1. Persepsi Terhadap Kesesuaian Penerapan SAKD**

Untuk mengetahui persepsi pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilaksanakan pada DPKD Sumatera Barat, dinilai melalui pengajuan 19 pertanyaan pada kuisioner yang terdiri dari :

##### **1. Aspek hukum keuangan daerah**

Pengujian terhadap aspek ini dengan melihat kesesuaian terhadap Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam bab XI, bagian pertama, pasal 232

- (1)Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah.
- (2)Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
- (3)Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam pasal 234 dijelaskan bahwa :

(1)Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD

Dasar lain yang digunakan sebagai rujukan penilaian adalah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 bagian kelima, pasal 96

- (1)Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- (2)Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

## 2. Dasar akuntansi dan pengukuran transaksi

Pengujian terhadap aspek ini dengan melihat kesesuaian terhadap Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam bab XI, bagian pertama, pasal 236 :

- (1)Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

## 3. Prosedur akuntansi

Pengujian terhadap aspek ini dengan melihat kesesuaian terhadap Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam bab XI, bagian pertama, pasal 233 :

- (1)Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:
  - Prosedur akuntansi penerimaan kas
  - Prosedur akuntansi pengeluaran kas
  - Prosedur akuntansi Aset tetap/barang milik daerah
  - Prosedur akuntansi selain kas



- (2)Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

#### 4. Jenis laporan pertanggungjawaban keuangan

Pengujian terhadap aspek ini dengan melihat kesesuaian terhadap Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam bab XI, bagian pertama, pasal 232 ayat (4), (5), dan (6) :

- (4)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 232 didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (5)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 232, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
- Laporan Realisasi Anggaran
  - Neraca
  - Laporan Arus Kas
  - Catatan Atas Laporan keuangan
- (6)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 232, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
- Laporan Realisasi Anggaran
  - Neraca
  - Catatan Atas Laporan keuangan

#### 5. Elemen laporan pertanggungjawaban keuangan dan penggunaan kode rekening akuntansi

Pengujian terhadap aspek ini dengan melihat kesesuaian terhadap Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam bab XI, bagian pertama, pasal 235 :

- (1)Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
- (2)kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.



(3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.

**6. Periode akuntansi dan kebijakan umum pelaporan keuangan daerah.**

Pengujian terhadap aspek ini dengan melihat kesesuaian terhadap Permendagri No.13 Tahun 2006 dalam bab XI, bagian pertama, pasal 289 :

- (1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada kepala daerah.
- (2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Dalam Bab XII, bagian kedua mengenai laporan tahunan pada pasal 294 :

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pasal 302 :

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan.
- (2) laporan keuangan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

**2. Pemahaman pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap SAKD**

Untuk mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki oleh para pegawai di DPKD Sumatera Barat terhadap SAKD dinilai melalui pengajuan 16 pertanyaan pada kuisioner yang terdiri dari :

**1. Karakteristik SAKD**

2. Prosedur akuntansi
3. Dasar akuntansi dan pengukuran transaksi
4. Laporan keuangan dalam SAKD
5. Periode akuntansi dan perlakuan depresiasi

### 3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam penerapan SAKD.

Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja. Contoh mobil, komputer, pulpen, kertas, tinta printer, dan lain- lain. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. contoh gedung kantor.

Tahap ketiga ini digunakan untuk mengetahui persepsi para pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap sarana dan prasarana yang ada dalam lingkungan DPKD Sumatera Barat. Penilaian ini diuji melalui pengajuan 10 pertanyaan, yang terdiri dari :

1. Ketersedian sarana
2. Ketersedian prasana

### III.5 Penilaian dan Teknik Analisis Data.

Untuk menilai jawaban yang diberikan oleh para responden, penulis menggunakan metode :

1. Untuk perhitungan nilai terhadap jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk variabel tingkat pemahaman pegawai DPKD Sumatera

Barat terhadap SAKD yang terdiri dari 16 pertanyaan pilihan ganda, setiap pertanyaan yang benar diberi nilai 1, sementara yang salah diberi nilai 0. Jawaban responden akan dihitung dan diberikan nilai. Penilaian tingkat kesadaran dan pemahaman pegawai akan dilakukan berdasarkan interval berikut :

Sangat Paham (76 % - 100% dari keseluruhan jawaban yang benar )

Paham (51 % - 75% dari keseluruhan jawaban yang benar )

Kurang Paham (26 % - 50% dari keseluruhan jawaban yang benar )

Tidak Paham (0 % - 25% dari keseluruhan jawaban yang benar )

2. Untuk pengujian variabel ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia digunakan metode perhitungan skala likert dengan bobotnya sebagai berikut :

Sangat setuju 5

Setuju 4

Tidak tahu 3

Kurang setuju 2

Tidak setuju 1

Setelah penilaian diberikan berdasarkan skala likert selanjutnya akan dilihat persepsi para pegawai terhadap ketersediaan sarana dan prasaran yang diadakan oleh DPKD Sumatera Barat dalam rangka penerapan SAKD sesuai dengan pedoman yang ada. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara :

Sangat lengkap (76 % - 100% dari keseluruhan jawaban yang benar )

Lengkap (51 % - 75% dari keseluruhan jawaban yang benar )

Kerang lengkap (26 % - 50% dari keseluruhan jawaban yang benar )

Tidak lengkap (0 % - 25% dari keseluruhan jawaban yang benar )

3. Untuk mencari Persentase digunakan formula

$$\% = f/n \times 100 \%$$

Dimana : % = persentase

f = Frekuensi

n = Jumlah Sampel

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **IV.1 Proses Pengumpulan Data**

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan survey dan penyebaran kuisioner ke DPKD Sumbar. Proses ini sudah mendapat izin sebelumnya dari Dinas Pemerintahan Kesbangpol dan Linmas dan izin penelitian dari DPKD Sumbar sendiri.

#### **IV.2 Proses Pengujian Data**

##### **1. Uji Validitas**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh data yang diperoleh dari jawaban kuisioner dapat digunakan untuk penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji validitas data konstruk, dengan bantuan microsoft excel. Dengan menggunakan  $\alpha = 5 \%$ , ditentukan seberapa banyak data yang dapat digunakan untuk penelitian. Proses klasifikasi data dilampirkan pada lampiran 1.

##### **2. Uji Reliabilitas**

Berikut ini adalah pengujian reliabilitas dengan menggunakan teknik *Split Half*, digunakan untuk menilai apakah data hasil angket/kuisioner dapat dipercaya/ reliabel atau tidak.

1. Nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item angket yang valid. Item yang tidak valid tidak dilibatkan dalam pengujian reliabilitas.



2. Kriterianya: instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh  $>0,60$  (Imam Ghazali, 2002:133) 1

Korelasi ( $r$ ) =  $0,947824$

$$R = \frac{2r}{1+r}$$

$$R = \frac{2(0,947824)}{1+0,947824}$$

$$R = 0,97323$$

Angka  $0,97323 > 0,60$  menunjukkan bahwa data dapat diandalkan untuk dilakukan penelitian.

#### IV.3 Persepsi Terhadap Kesesuaian Penerapan SAKD

Pengujian terhadap terdapatnya kesesuaian penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada DPKD Provinsi Sumatera Barat dengan Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan Pedoman Lainnya yang relevan dilakukan untuk melihat apakah pemerintah daerah ini telah menerapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan akuntansi, dengan SAKD yang diatur oleh pemerintah dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006 serta pedoman lainnya yang dianggap relevan seperti Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2005, serta Permendagri no. 59 Tahun 2007.

Penilaian ini dilakukan dengan menganalisa dan menilai jawaban yang diberikan oleh para responden melalui kuisioner yang disebar melalui beberapa

bagian, yakni bagian akuntansi dan bagian penganggaran. Indikator yang digunakan adalah kesesuaian aspek hukum SAKD, basis akuntansi dan pengukuran transaksi, prosedur akuntansi, jenis laporan pertanggungjawaban keuangan, elemen laporan pertanggungjawaban keuangan dan penggunaan kode rekening akuntansi, serta periode akuntansi dan kebijakan umum pelaporan keuangan daerah.

Terdapat beberapa data tambahan yang diperoleh melalui wawancara, dimana wawancara dilakukan untuk memenuhi beberapa pertanyaan yang tidak tertulis dalam kuisioner.

**IV.3.1 Persepsi Terhadap Penerapan Aspek Hukum SAKD.**

Pertanyaan nomor 1 dan 2 pada bagian 2, ditujukan untuk mengetahui seberapa besar persepsi para pegawai terhadap penerapan aspek hukum SAKD. Dasar yang digunakan adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan penerapannya dalam DPKD Sumbar. Hasil pengumpulan data terkait dengan persepsi terhadap penerapan aspek hukum SAKD pada 2 bagian dalam DPKD Sumatera Barat ditampilkan dalam tabel 4.1 berikut ini

**TABEL 4.1 Kesesuaian Penerapan Aspek Hukum SAKD.**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	88,3
2	Bagian Anggaran	85,69
Rata – Rata		86,995

**TABEL MODUS**

No	Keterangan	Jumlah Jawaban
1	Sangat Setuju	14
2	Setuju	24
3	Tidak Tahu	-
4	Kurang Setuju	-
5	Tidak Setuju	-

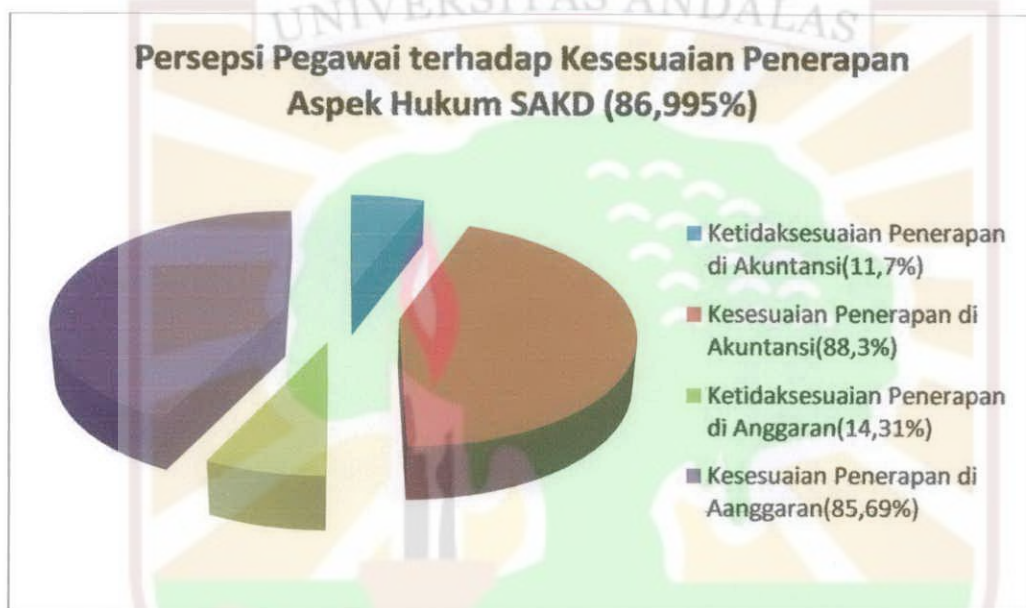
Dari tabel modus diatas didapat bahwa rata-rata para pegawai yang menjadi sampel penelitian menjawab setuju terkait dengan pertanyaan yang diajukan.

Tabel 4.1 menggambarkan bahwa persepsi para pegawai bagian akuntansi DPKD Sumatera Barat terhadap penerapan aspek hukum SAKD pada adalah sebesar 88,3 %, sementara itu pada bagian penganggaran sebesar 85,69%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan persepsi para pegawai DPKD Sumbar adalah sebesar 86,995%. Angka ini menunjukkan bahwa para pegawai telah mempunyai persepsi penerapan SAKD pada DPKD Sumbar sudah memenuhi salah satu kriteria wajib, yakni adanya aspek hukum atau legalitas yang jelas. Ini ditunjukkan dengan adanya keputusan Kepala Daerah tentang sistem akuntansi keuangan daerah dan pejabat daerah yang bertanggungjawab mengelola keuangan serta menjalankan perintah Kepala Daerah. Seluruh pertanyaan mengenai persepsi pegawai terhadap penerapan aspek hukum pada

DPKD Sumbar sangat sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.1 berikut ini :

**DIAGRAM PIE 4.1 Kesesuaian Penerapan Aspek Hukum SAKD**



#### **IV.3.2 Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian antara Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi**

Pertanyaan nomor 17 pada bagian 2, ditujukan untuk mengetahui persepsi pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap kesesuaian dasar akuntansi dan pengukuran transaksi yang tertuang dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Hasil pengumpulan data terkait dengan persepsi pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap kesesuaian antara dasar akuntansi dan pengukuran transaksi pada 2 bagian dalam DPKD Sumatera Barat ditampilkan dalam tabel 4.2 berikut ini



**TABEL 4.2 Kesesuaian Penerapan antara Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi.**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	85
2	Bagian Anggaran	88,57
Rata – Rata		86,79

**TABEL MODUS**

No	Keterangan	Jumlah Responden
1	Sangat Setuju	6
2	Setuju	13
3	Tidak Tahu	-
4	Kurang Setuju	-
5	Tidak Setuju	-

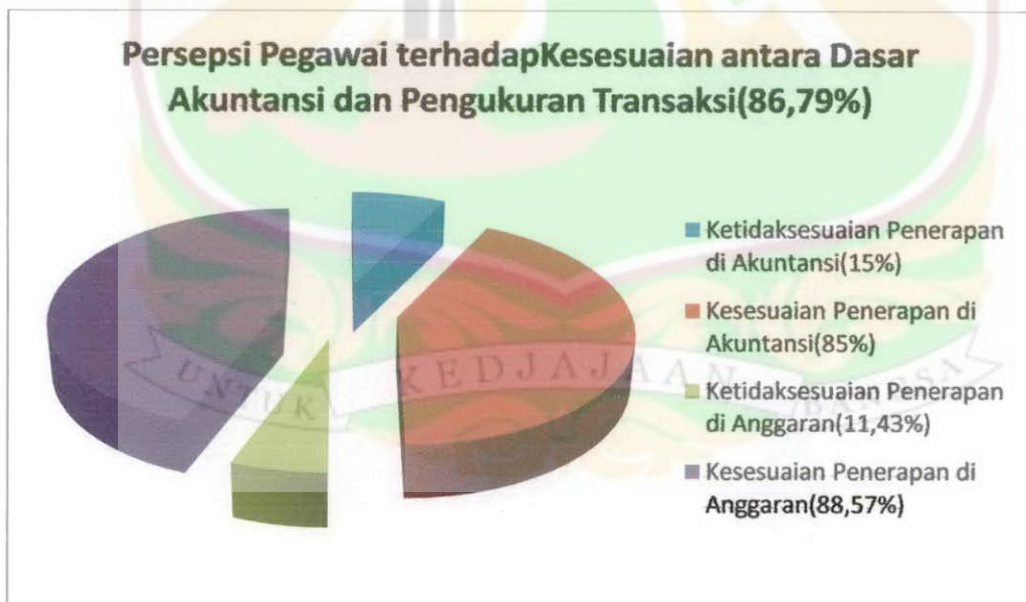
Dari tabel modus diatas didapat bahwa rata-rata para pegawai yang menjadi sampel penelitian menjawab setuju terkait dengan perntanyaan yang diajukan.

Tabel 4.2 menggambarkan bahwa persepsi pegawai bagian akuntansi terhadap kesesuaian antara dasar akuntansi dan pengukuran transaksi adalah



sebesar 85 %, sementara itu pada bagian penganggaran sebesar 88,57%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan persepsi pegawai DPKD Sumbar adalah sebesar 86,79%. Angka ini menunjukkan bahwa para pegawai mempunyai persepsi bahwa DPKD Sumbar sudah merubah dasar akuntansi yang digunakan oleh DPKD Sumbar menjadi Acrual Basis, dimana pencatatan transaksi dilakukan ketika terjadinya transaksi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari persepsi para pegawai DPKD Sumatera Barat bahwa penggunaan dasar akuntansi dan pengukuran transaksi pada DPKD Sumbar sangat sesuai dengan yang tertera dalam Permendagri No.13 Tahun 2006. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.2 berikut ini :

**DIAGRAM PIE 4.2 Kesesuaian Penerapan antara Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi.**



#### IV.3.3 Kesesuaian Prosedur Akuntansi

Pertanyaan nomor 5, 6, 7 dan 8 pada bagian 2, ditujukan untuk mengetahui persepsi para pegawai terhadap kesesuaian penerapan prosedur akuntansi yang diterapkan pada DPKD Sumbar dengan Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan pedoman yang lainnya yang dianggap relevan diuji dengan menilai beberapa aspek, diantaranya adalah penggunaan buku jurnal, buku besar dan buku besar pembantu sebagai media untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Disamping itu, juga dilihat kesesuaian penerapan prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi untuk aset tetap, dan selain kas. Hasil pengujian terhadap kesesuaian prosedur akuntansi dapat dilihat dalam tabel 4.3 dibawah ini

**TABEL 4.3 Kesesuaian Prosedur Akuntansi.**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	86,23
2	Bagian Anggaran	83,5
Rata - Rata		84,87

**TABEL MODUS**

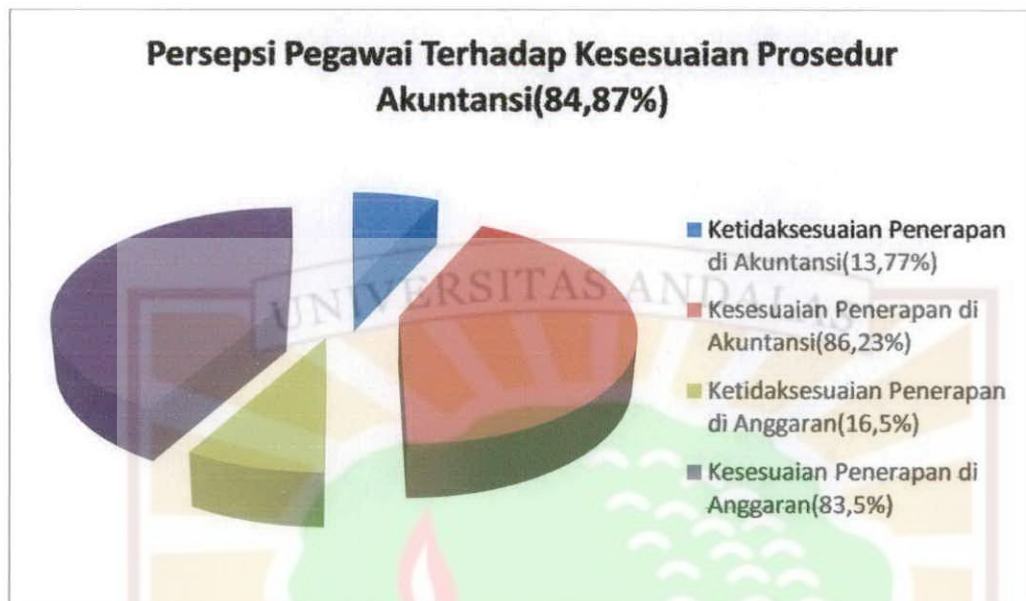
No	Keterangan	Jumlah Responden
1	Sangat Setuju	20
2	Setuju	56
3	Tidak Tahu	-
4	Kurang Setuju	-

5	Tidak Setuju	-
---	--------------	---

Dari tabel modus diatas didapat bahwa rata-rata para pegawai yang menjadi sampel penelitian menjawab setuju terkait dengan pertanyaan yang diajukan.

Tabel 4.3 menggambarkan bahwa persepsi para pegawai pada bagian akuntansi terhadap kesesuaian prosedur akuntansi adalah sebesar 86,23%, sementara itu pada bagian penganggaran sebesar 83,5%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan persepsi pegawai DPKD Sumbar adalah sebesar 84,87%. Angka yang diperoleh dari pengolahan jawaban responden ini menunjukkan bahwa para pegawai telah berasumsi bahwa DPKD Sumbar telah menerapkan prosedur akuntansi yang sangat sesuai dengan prosedur akuntansi yang diatur dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan pedoman lainnya yang dianggap relevan. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.3 berikut ini :

DIAGRAM PIE 4.3 Kesesuaian Prosedur Akuntansi.



#### IV.3.4 Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanyaan nomor 10, dan 14 pada bagian 2, ditujukan untuk mengetahui bagaimana persepsi para pegawai terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan yang dihasilkan oleh DPKD Sumbar, apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan pedoman lainnya yang dianggap relevan. Hasil pengujian terhadap kesesuaian jenis laporan pertanggungjawaban keuangan dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah ini



**TABEL 4.4 Kesesuaian Jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	84,8
2	Bagian Anggaran	81,4
Rata - Rata		83,1

**TABEL MODUS**

No	Keterangan	Jumlah Responden
1	Sangat Setuju	7
2	Setuju	31
3	Tidak Tahu	-
4	Kurang Setuju	-
5	Tidak Setuju	-

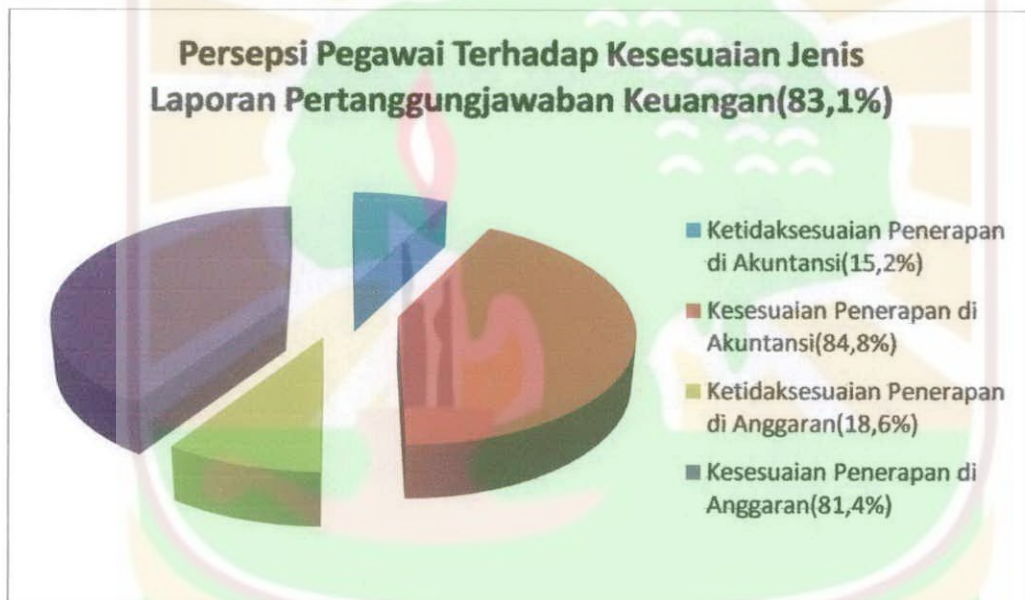
Dari tabel modus diatas didapat bahwa rata-rata para pegawai yang menjadi sampel penelitian menjawab setuju terkait dengan pertanyaan yang diajukan.

Tabel 4.4 menggambarkan bahwa persepsi pegawai pada bagian akuntansi DPKD Sumatera Barat terhadap kesesuaian jenis laporan pertanggungjawaban keuangan adalah sebesar 84,8%, sementara itu pada bagian penganggaran sebesar 81,4%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan persepsi pegawai dalam DPKD Sumbar adalah sebesar 83,1%. Angka ini



menunjukkan pegawai DPKD sudah mempunyai persepsi bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh DPKD Sumbar sangat sesuai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang diatur dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan pedoman lainnya yang dianggap relevan, yakni laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.4 berikut ini :

**DIAGRAM PIE 4. 4 Kesesuaian Jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**



#### **IV.3.5 Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Elemen Laporan Keuangan dan Penggunaan Kode Rekening Akuntansi**

Pertanyaan nomor 3, 4, 15 dan 18 pada bagian 2, ditujukan untuk menilai persepsi para pegawai DPKD Sumatera barat terhadap kesesuaian elemen laporan keuangan DPKD Sumbar dengan yang ditetapkan dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006. Hasil pengujian terhadap kesesuaian elemen

laporan keuangan dan penggunaan kode rekening akuntansi dapat dilihat dalam tabel 4.5 dibawah ini.

**TABEL 4.5 Kesesuaian Elemen Laporan Keuangan dan Penggunaan Kode Rekening Akuntansi.**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	84,9
2	Bagian Anggaran	83,53
Rata - Rata		84,22

**TABEL MODUS**

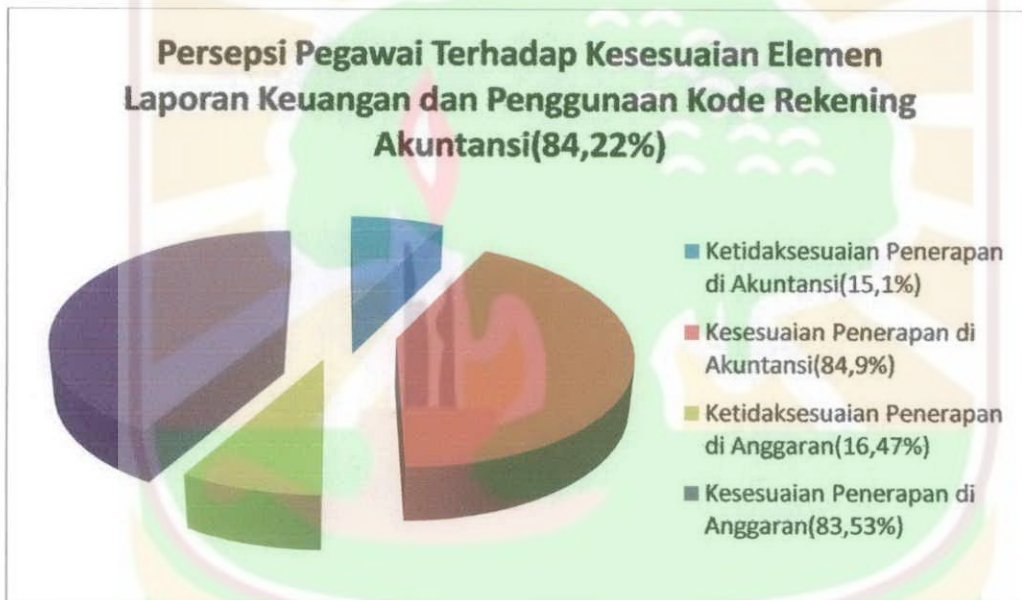
No	Keterangan	Jumlah Responden
1	Sangat Setuju	16
2	Setuju	60
3	Tidak Tahu	-
4	Kurang Setuju	-
5	Tidak Setuju	-

Dari tabel modus diatas didapat bahwa rata-rata para pegawai yang menjadi sampel penelitian menjawab setuju terkait dengan pertanyaan yang diajukan.

Tabel 4.5 menggambarkan bahwa para pegawai pada bagian akuntansi mempunyai persepsi bahwa kesesuaian elemen laporan keuangan dan penggunaan kode rekening akuntansi adalah sebesar 84,9%, sementara itu pada bagian penganggaran sebesar 83,53%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan

persepsi pegawai dalam DPKD Sumbar adalah sebesar 84,22%. Angka ini menunjukkan para pegawai sudah berasumsi bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh DPKD Sumbar sangat sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.5 berikut ini :

**DIAGRAM PIE 4. 5 Kesesuaian Elemen Laporan Keuangan dan Penggunaan Kode Rekening Akuntansi.**



#### **IV.3.6 Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Periode Akuntansi dan Kebijakan Umum Pelaporan Keuangan**

Pertanyaan nomor 9, 11, 12 dan 13 pada bagian 2, ditujukan untuk mengetahui bagaimana persepsi para pegawai terhadap kesesuaian penerapan periode akuntansi dan kebijakan umum yang diterapkan oleh DPKD Sumbar dengan yang ditetapkan dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006. Hasil



pengujian terhadap kesesuaian periode akuntansi dan kebijakan umum pelaporan keuangan dapat dilihat dalam tabel 4.6 dibawah ini

**TABEL 4.6 Kesesuaian Periode Akuntansi dan Kebijakan Umum Pelaporan Keuangan**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	85,83
2	Bagian Anggaran	84,24
Rata - Rata		85,035

**TABEL MODUS**

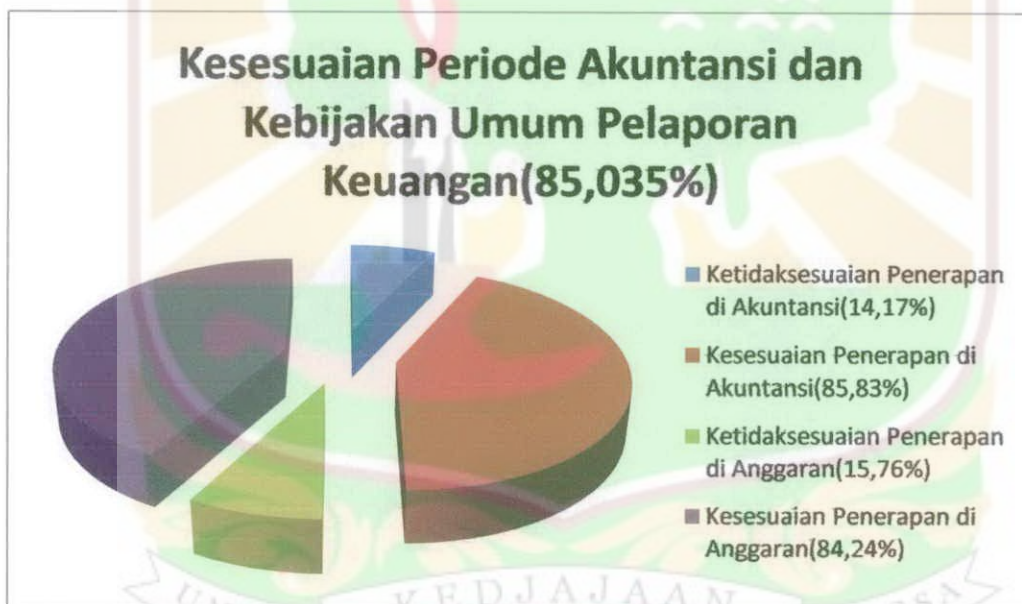
No	Keterangan	Jumlah Responden
1	Sangat Setuju	21
2	Setuju	55
3	Tidak Tahu	-
4	Kurang Setuju	-
5	Tidak Setuju	-

Dari tabel modus diatas didapat bahwa rata-rata para pegawai yang menjadi sampel penelitian menjawab setuju terkait dengan pertanyaan yang diajukan.

Tabel 4.6 menggambarkan bahwa persepsi pegawai pada bagian akuntansi terhadap kesesuaian penerapan periode akuntansi dan kebijakan umum yang diterapkan adalah sebesar 85,83%, sementara itu pada bagian

penganggaran sebesar 84,24%. Untuk hasil rata-rata persepsi keseluruhan pegawai dalam DPKD Sumbar adalah sebesar 85,035%. Angka ini menunjukkan para pegawai berasumsi bahwa penerapan SAKD pada DPKD Sumbar telah menggunakan periode serta kebijakan umum yang sesuai dengan Permendagri no. 13 Tahun 2006 dan kebijakan yang digunakan juga sangat sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.6 berikut ini :

**DIAGRAM PIE 4. 6 Kesesuaian Periode Akuntansi dan Kebijakan Umum Pelaporan Keuangan**



Kesimpulan terhadap kesesuaian penerapan SAKD pada DPKD Sumbar dengan yang ditetapkan dalam Permendagri no. 13 Tahun 2006 dengan Pedoman Lainnya yang dianggap relevan dapat dilihat pada tabel berikut



**TABEL 4.7 KESIMPULAN TERHADAP KESESUAIAN PENERAPAN SAKD PADA DPKD  
SUMBAR DENGAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006**

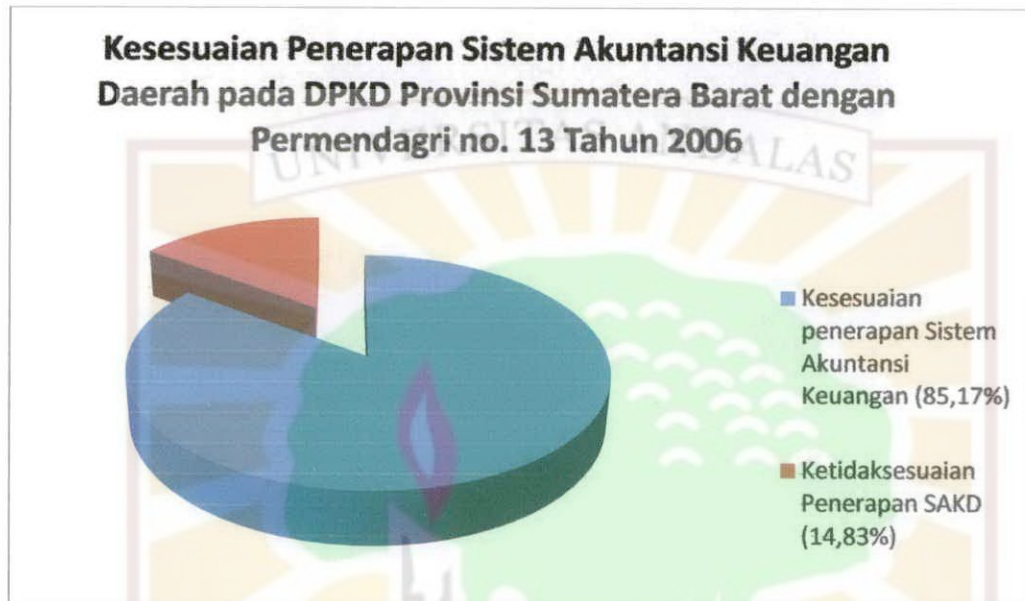
No	Keterangan	Bid. Akuntansi (%)	Bid. Anggaran (%)
1	Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Penerapan Aspek Hukum SAKD	88,3	85,69
2	Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian antara Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi	85	88,57
3	Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Prosedur Akuntansi	86,23	83,5
4	Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	84,8	81,4
5	Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Elemen Laporan Keuangan dan Penggunaan Kode Rekening Akuntansi	84,9	83,53

6	Persepsi Pegawai Terhadap Kesesuaian Periode Akuntansi dan Kebijakan Umum Pelaporan Keuangan	85,83	84,24
Rata - Rata		85,84	84,49
DPKD Sumbar			85,17

Tabel 4.7 menunjukkan pegawai di DPKD Sumatera Barat sudah berpersepsi bahwa penerapan di DPKD Sumbar sudah sangat sesuai dengan yang tertera dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan pedoman lainnya yang dianggap relevan. Kesesuaian ini ditunjukkan melalui persentase kesesuaian sebesar 85,17%. Pada hakikatnya pengujian ini lazimnya dilakukan hanya pada bagian akuntansi namun bagian anggaran juga melakukan tugas penganggaran yang berpedoman dari Permendagri No 13 Tahun 2006 serta Permendagri No. 59 Tahun 2007, sehingga kedua bagian ini memiliki dasar yang sama dalam mengerjakan tugas masing-masing bagian. Kesesuaian dasar ini dapat dilihat dari jumlah persentase yang diperoleh, yakni bagian akuntansi sebesar 85,84 % sementara bagian anggaran sebesar 84,49%.

Penggambaran kesesuaian penerapan SAKD pada DPKD Sumbar dapat dilihat pada diagram pie berikut ini

**DIAGRAM PIE 4.7 KESESUAIAN PENERAPAN SAKD PADA DPKD SUMBAR**



#### **IV.4 Pemahaman Pegawai DPKD Sumbar Mengenai SAKD**

Pegawai sebagai sumber daya intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu kelancaran kerja DPKD. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan para pegawai Pemda mengenai dasar-dasar akuntansi dan akuntansi keuangan daerah. Pengujian ini dilakukan melalui evaluasi 5 indikator, yakni : Karakteristik SAKD, prosedur akuntansi, dasar akuntansi dan pengukuran transaksi, laporan keuangan dalam SAKD, dan periode akuntansi dan perlakuan depresiasi.

Dari 19 sampel yang menjadi objek penelitian, para pegawai yang bekerja di DPKD Sumbar ini memiliki latar belakang pendidikan yang beragam serta jenis tanggungjawab pekerjaan yang berbeda pula.

Berikut tabel 4.8 menunjukkan latar belakang pendidikan pegawai yang menjadi sampel penelitian.

**TABEL 4.8 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN SAMPEL PENELITIAN**

No	Latar Belakang pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	10
3	D3	0
4	SMA	4

Sedangkan tabel 4.9 menunjukkan tanggung jawab pekerjaan para pegawai yang menjadi sampel penelitian.

**TABEL 4.9 PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB**

	Bagian Akuntansi	Bagian Anggaran
1	Kepala Bidang Akuntansi	Kabid Anggaran
2	Kasub Pemerintahan	Kasi. Anggaran KeSosBud
3	Kasubit Akuntansi Ekonomi	Kasi. Anggaran Pemerintahan
4	Kasubit Sosial Budaya	Kasi. Anggaran Ekonomi
5	Pengumpul dan Pengolah Data	Staff



#### IV.4.1 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Karakteristik SAKD

Pertanyaan nomor 13 dan 14 pada bagian 1, ditujukan untuk seberapa besar pemahaman para pegawai DPKD terhadap karakteristik SAKD itu sendiri. Hasil pengujian terhadap besarnya pemahaman pegawai terhadap karakteristik SAKD dapat dilihat dalam tabel 4.10 dibawah ini

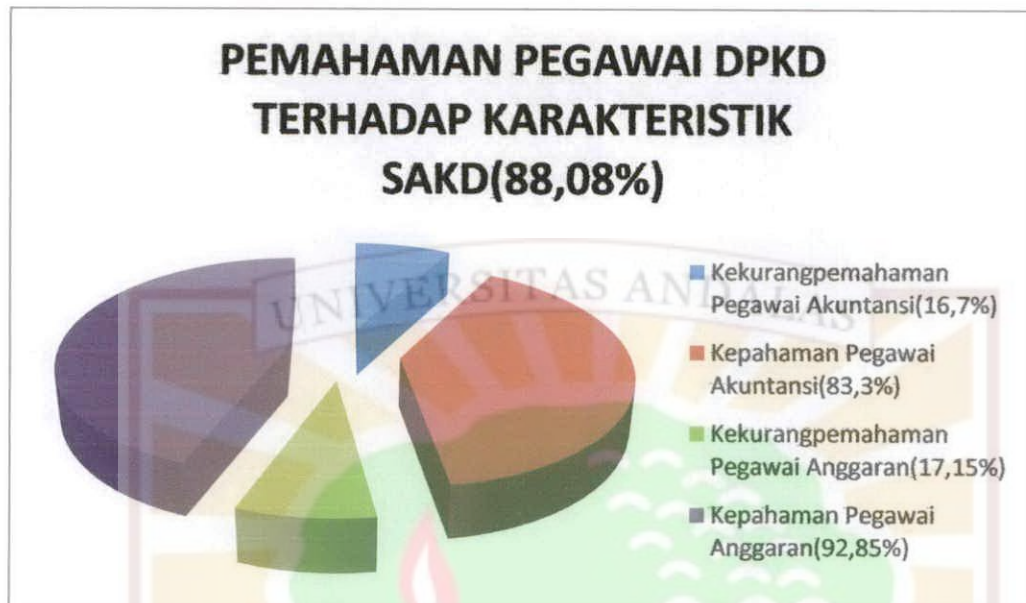
**TABEL 4.10 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP KARAKTERISTIK SAKD**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	83,3
2	Bagian Anggaran	92,85
Rata - Rata		88,08

Tabel 4.10 menggambarkan bahwa pemahaman pegawai DPKD terhadap karakteristik SAKD, pada bagian akuntansi adalah sebesar 83,3%, sementara itu, pada bagian penganggaran sebesar 92,85%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan penerapannya dalam DPKD Sumbar adalah sebesar 88,08%. Angka ini menunjukkan bahwa para pegawai DPKD di Provinsi Sumbar sangat memahami karakteristik SAKD. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.8 berikut ini :



**DIAGRAM PIE 4. 8 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP KARAKTERISTIK SAKD**



#### **IV.4.2 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Prosedur Akuntansi**

Pertanyaan nomor 1, 2, 3 dan 15 pada bagian 1, ditujukan untuk seberapa besar pemahaman para pegawai DPKD terhadap prosedur akuntansi.. Hasil pengujian terhadap besarnya pemahaman pegawai terhadap prosedur akuntansi dapat dilihat dalam tabel 4.11 dibawah ini

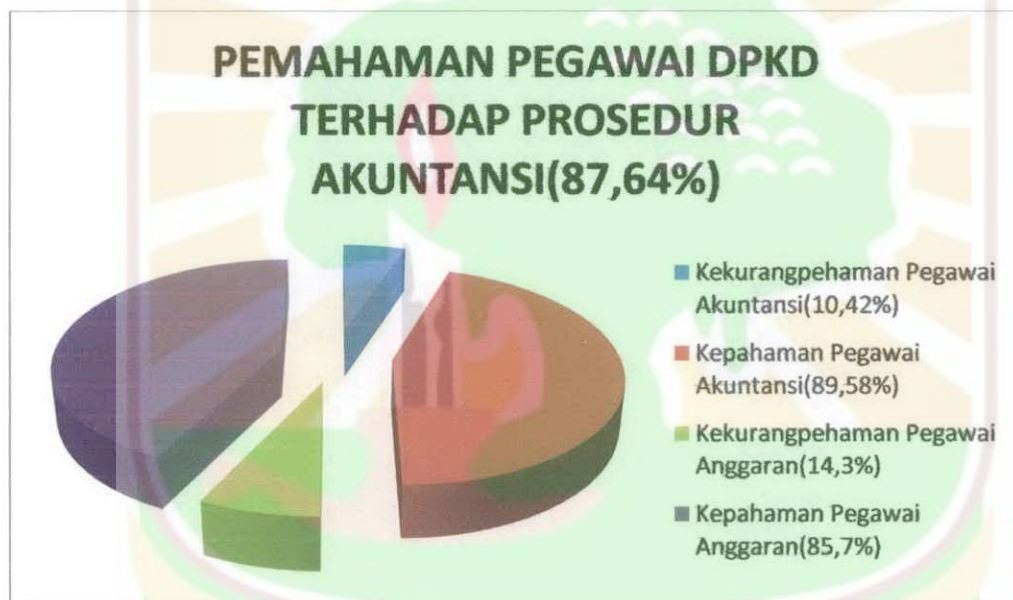
**TABEL 4.11 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP PROSEDUR AKUNTANSI**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	89,58
2	Bagian Anggaran	85,7
Rata - Rata		87,64

Tabel 4.11 menggambarkan bahwa pemahaman pegawai DPKD terhadap prosedur akuntansi, pada bagian akuntansi adalah sebesar 89,58%,

sementara itu, pada bagian penganggaran sebesar 85,7%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan penerapannya dalam DPKD Sumbar adalah sebesar 87,64%. Angka ini menunjukkan bahwa para pegawai DPKD di Provinsi Sumbar sangat memahami Prosedur akuntansi. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.9 berikut ini :

**DIAGRAM PIE 4. 9 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP PROSEDUR AKUNTANSI**



#### **IV.4.3 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi**

Pertanyaan nomor 12, dan 16 pada bagian 1, ditujukan untuk seberapa besar pemahaman para pegawai DPKD terhadap dasar akuntansi dan pengukuran transaksi. Hasil pengujian terhadap besarnya pemahaman pegawai terhadap dasar akuntansi dan pengukuran transaksi dapat dilihat dalam tabel 4.12 dibawah ini

**TABEL 4.12 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP DASAR AKUNTANSI DAN PENGUKURAN TRANSAKSI**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	79,15
2	Bagian Anggaran	64,27
	Rata - Rata	71,71

Tabel 4.12 menggambarkan bahwa pemahaman pegawai DPKD terhadap prosedur akuntansi, pada bagian akuntansi adalah sebesar 79,15%. Sementara itu, pada bagian penganggaran sebesar 64,27%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan penerapannya dalam DPKD Sumbar adalah sebesar 71,71%. Angka ini menunjukkan bahwa para pegawai DPKD di Provinsi Sumbar telah cukup memahami Prosedur akuntansi. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.10 berikut ini :

**DIAGRAM PIE 4. 10 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP DASAR AKUNTANSI DAN PENGUKURAN TRANSAKSI**





#### IV.4.4 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Laporan Keuangan Dalam SAKD

Pertanyaan nomor 4, 6, 7, 8, 10, dan 11 pada bagian 1, ditujukan untuk seberapa besar pemahaman para pegawai DPKD terhadap laporan keuangan dalam SAKD. Hasil pengujian terhadap besarnya pemahaman pegawai terhadap laporan keuangan dalam SAKD dapat dilihat dalam tabel 4.13

**TABEL 4.13 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DALAM SAKD**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	81,92
2	Bagian Anggaran	71,4
Rata - Rata		76,6

Tabel 4.13 menggambarkan bahwa pemahaman pegawai DPKD terhadap prosedur akuntansi, pada bagian akuntansi adalah sebesar 81,92%, sementara itu, pada bagian penganggaran sebesar 71,4%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan penerapannya dalam DPKD Sumbar adalah sebesar 76,6%. Angka ini menunjukkan bahwa para pegawai DPKD di Provinsi Sumbar sangat memahami laporan keuangan serta penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAKD. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.11 berikut ini :

**DIAGRAM PIE 4. 13 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DALAM SAKD**



#### **IV.4.5 Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Periode Akuntansi dan Perlakuan Depresiasi**

Pertanyaan nomor 5, dan 9 pada bagian 1, ditujukan untuk seberapa besar pemahaman para pegawai DPKD terhadap periode akuntansi dan perlakuan depresiasi. Hasil pengujian terhadap besarnya pemahaman pegawai terhadap periode akuntansi dan perlakuan depresiasi dapat dilihat dalam tabel

4.14

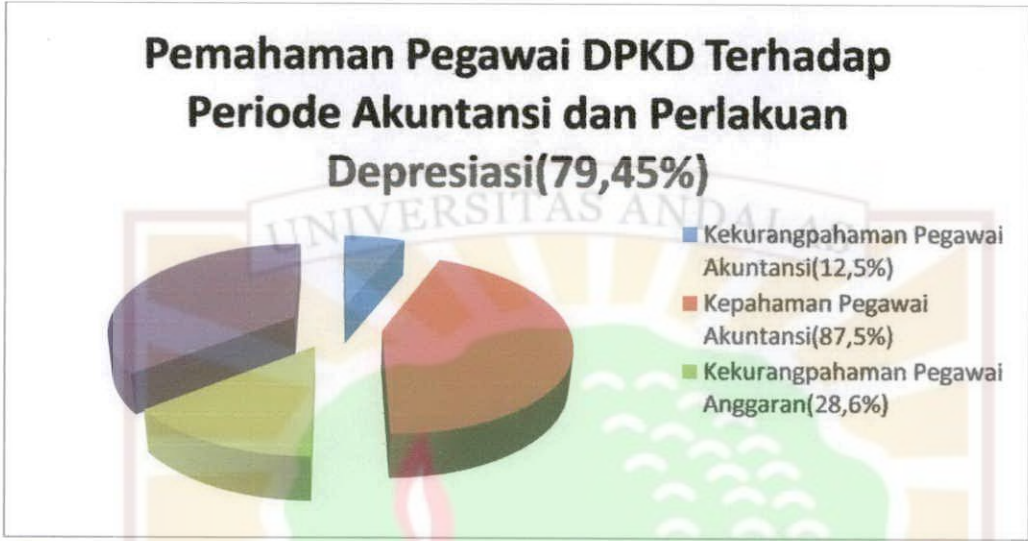


**TABEL 4.14 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP PERIODE AKUNTANSI DAN PERLAKUAN DEPRESIASI**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	87,5
2	Bagian Anggaran	71,4
Rata - Rata		79,45

Tabel 4.14 menggambarkan bahwa pemahaman pegawai DPKD terhadap prosedur akuntansi, pada bagian akuntansi adalah sebesar 87,5%, sementara itu, pada bagian penganggaran sebesar 71,4%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan penerapannya dalam DPKD Sumbar adalah sebesar 79,45%. Angka ini menunjukkan bahwa para pegawai DPKD di Provinsi Sumbar sangat memahami periode akuntansi dan bagaimana memperlakukan depresiasi untuk aktiva tertentu. Penggambaran secara diagram ditampilkan dalam diagram pie 4.12 berikut ini :

**DIAGRAM PIE 4. 12 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD TERHADAP PERIODE AKUNTANSI  
DAN PERLAKUAN DEPRESIASI**



Kesimpulan penilaian yang diperoleh dari 5 indikator diatas dapt dilihat pada tabel berikut ini

**TABEL 4.15 KESIMPULAN PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD**

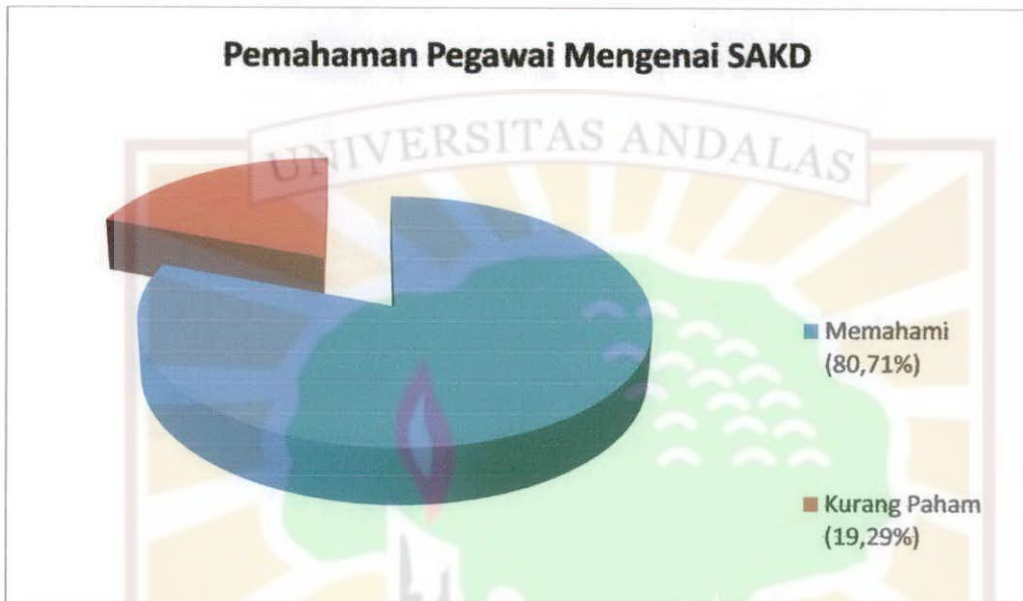
No	Keterangan	Bid. Akuntansi (%)	Bid. Anggaran (%)
1	Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Karakteristik SAKD	83,3	92,85
2	Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Prosedur Akuntansi	89,58	85,7
3	Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi	79,15	64,27
4	Pemahaman Pegawai DPKD	81,92	71,4

	Terhadap Laporan Keuangan Dalam SAKD		
5	Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Peiode Akuntansi dan Perlakuan Depresiasi	87,5	71,4
	Rata - Rata	84,29	77,13
	DPKD Sumbar		80,71

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa pemahaman para pegawai DPKD Sumbar di bidang akuntansi mengenai SAKD adalah sebesar 84,29%. Sementara itu, pada bagian anggaran adalah sebesar 77,13%. Untuk hasil rata-rata pemahaman para pegawai DPKD Sumbar mengenai SAKD ditunjukkan dengan persentase sebesar 80,71%. Ini dapat diartikan bahwa para pegawai di DPKD Sumbar sudah sangat memahami SAKD, dan pentingnya penerapan SAKD yang sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase terendah diperoleh pada indikator 3, yakni Pemahaman Pegawai DPKD Terhadap Dasar Akuntansi dan Pengukuran Transaksi pada bagian anggaran. Selain faktor latar belakang pendidikan responden yang memberikan jawaban atas kuisisioner, juga dipengaruhi fungsi dari dasar akuntansi dan pengukuran transaksi itu sendiri. Kedua indikator tersebut lebih tepat untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi, bagian anggaran hanya menggunakan dasar penganggaran yang telah dibentuk melalui RAPBD untuk kemudian membentuk APBD.

Penggambaran pemahaman para pegawai mengenai SAKD pada DPKD Sumbar dapat dilihat pada diagram pie berikut ini

**DIAGRAM PIE 4.13 PEMAHAMAN PEGAWAI DPKD MENGENAI SAKD**



#### **IV.5 Persepsi Pegawai DPKD Sumatera Barat Mengenai Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Membantu Kelancaran Penerapan SAKD pada DPKD**

Sarana dan prasarana memiliki peranan yang cukup jelas dalam membantu kelancaran kerja para pegawai DPKD, Pengujian ini dilakukan melalui evaluasi 2 indikator, yakni : Ketersediaan sarana, dan ketersediaan prasarana. Pengujian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan ketersediaan bangunan, alat tulis kantor, alat pendukung lainnya serta kenyamanan dan keamanan tempat kerja.



**IV.5.1 Persepsi Pegawai Terhadap Ketersediaan Sarana**

Pertanyaan nomor 20, 22, dan 29 pada bagian 2, ditujukan untuk mengetahui besarnya persepsi para pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap kualitas dan kelengkapan sarana yang tersedia dalam rangka mendukung kerja pegawai DPKD. Hasil pengujian terhadap seberapa banyaknya sarana yang tersedia serta kualitas sarana yang tersedia dalam mendukung kerja pegawai DPKD dapat dilihat dalam tabel 4.16 dibawah ini

**TABEL 4.16 KETERSEDIAAN SARANA**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	65,53
2	Bagian Anggaran	64,72
Rata - Rata		65,13

**TABEL MODUS**

No	Keterangan	Jumlah Responden
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	33
3	Tidak Tahu	-
4	Kurang Setuju	9
5	Tidak Setuju	10

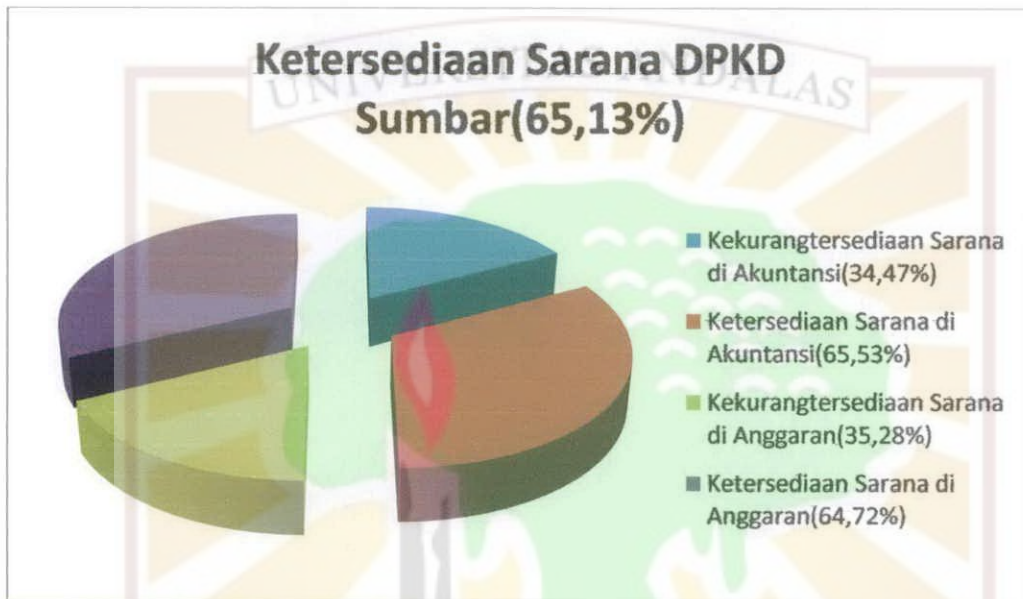


Dari tabel modus diatas didapat bahwa rata-rata para pegawai yang menjadi sampel penelitian menjawab setuju terkait dengan pertanyaan yang diajukan.

Tabel 4.16 menggambarkan bahwa persepsi pegawai bagian akuntansi DPKD terhadap sarana yang dimiliki oleh DPKD Sumatera Barat adalah sebesar 65,53%, sementara itu, pada bagian penganggaran sebesar 64,72%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan persepsi pegawai DPKD Sumbar adalah sebesar 65,13%. Angka ini menunjukkan bahwa para pegawai DPKD Sumatera Barat berasumsi bahwa DPKD Provinsi Sumbar memiliki sarana yang cukup lengkap untuk menyokong atau mewartakan kerja para pegawai di DPKD provinsi Sumbar. Dari perhitungan masing-masing indikator, persentase terendah terdapat pada indikator tempat penyimpanan dokumen, pada bagian akuntansi dinilai sebesar 30 % sedangkan pada bagian anggaran sebesar 28,57%. Salah satu narasumber mengatakan bahwa rendahnya penilaian yang diberikan oleh responden kemungkinan berasal dari pengamatan responden terhadap tempat penyimpanan dokumen yang ada saat ini dirasa masih kurang memadai, yakni hanya berupa lemari kayu, para pegawai mengharapkan adanya tempat penyimpanan yang lebih layak dan teratur. Sementara untuk dokumen-dokumen yang hilang akibat gempa 31 September silam, masih tidak diketahui keberadaannya. Dokumen-dokumen yang hilang tersebut memiliki dokumen salinan namun berupa softcopy atau salinan di komputer.

Penggambaran ketersediaan sarana pada DPKD Sumbar dapat dilihat pada diagram pie 4.14 berikut ini

**DIAGRAM PIE 4. 14 KETERSEDIAAN SARANA**



#### **IV.5.2 Persepsi Pegawai Terhadap Ketersediaan Prasarana**

Pertanyaan nomor 25, 26, 27, dan 28 pada bagian 2, ditujukan untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai terhadap prasarana yang tersedia serta kualitas prasarana yang tersedia dalam mendukung kerja pegawai DPKD. Hasil pengujian terhadap seberapa banyaknya prasarana yang tersedia serta kualitas dari prasarana yang tersedia dalam mendukung kerja pegawai DPKD dapat dilihat dalam tabel 4.17 dibawah ini

**TABEL 4.17 KETERSEDIAAN PRASARANA**

No	Bagian Dari DPKD Sumbar	Persentase
1	Bagian Akuntansi	60,38
2	Bagian Anggaran	55,68
Rata - Rata		58,03

**TABEL MODUS**

No	Keterangan	Jumlah Responden
1	Sangat Setuju	8
2	Setuju	30
3	Tidak Tahu	1
4	Kurang Setuju	23
5	Tidak Setuju	14

Dari tabel modus diatas didapat bahwa rata-rata para pegawai yang menjadi sampel penelitian menjawab setuju terkait dengan permtanyaan yang diajukan.

Tabel 4.17 menggambarkan bahwa persepsi pegawai bagian akuntansi DPKD terhadap prasarana yang dimiliki oleh DPKD Sumatera Barat adalah sebesar 60,38%, sementara itu, pada bagian penganggaran sebesar 55,68%. Untuk hasil rata-rata keseluruhan penerapannya dalam DPKD Sumbar adalah sebesar 58,03%. Angka ini menunjukkan bahwa para pegawai DPKD Sumatera Barat berasumsi bahwa DPKD Sumatera Barat memiliki prasarana yang cukup

lengkap untuk menyokong atau mewartahi kerja para pegawai di DPKD provinsi Sumbar dalam menerapkan SAKD.

Berikut tabel yang memperlihatkan masing-masing indikator pada tiap bagian dalam DPKD Sumbar

**TABEL 4.18 PENILAIAN SARANA DAN PRASARANA**

No	Indikator Penilaian	Bagian Akuntansi	Bagian Anggaran
1	Penerapan SAKD menggunakan petunjuk atau manual yang jelas	83,3	82,8
2	Ruangan kantor memadai untuk menerapkan SAKD	33,3	31,4
3	Perlengkapan kantor seperti kertas dan ATK cukup tersedia	86,6	82,8
4	Daya listrik mencukupi	38,3	25,71

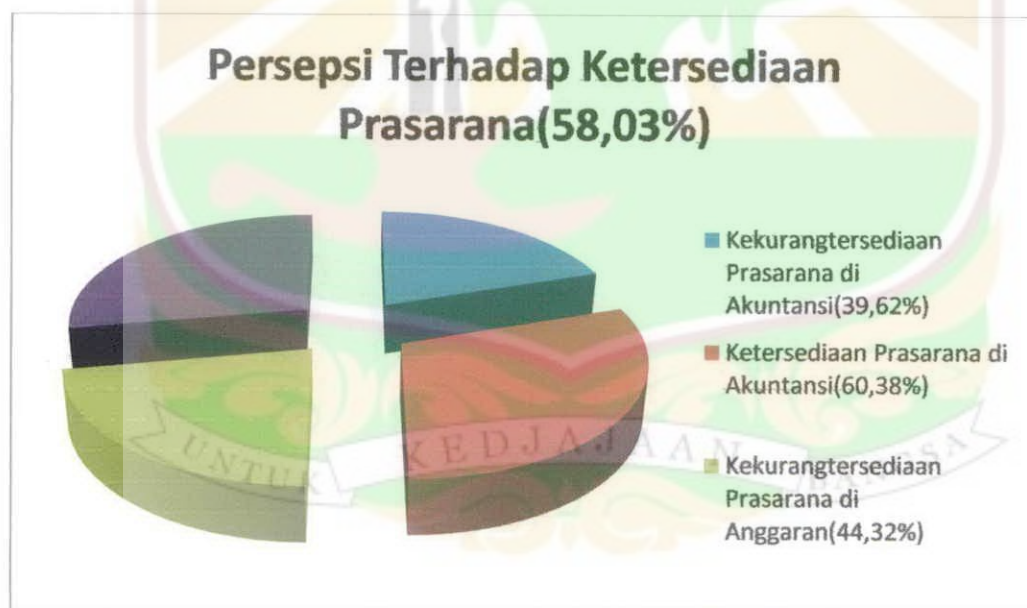
Tabel 4.18 menggambarkan bahwa 2 indikator memberikan penilaian dibawah 50% pada kedua bagian, yakni ruangan kantor yang memadai dan daya listrik yang mencukupi. Untuk ruangan kantor, disebabkan oleh belum adanya perbaikan secara fisik yang dilakukan pemerintah daerah terhadap kantor DPKD Sumbar ini setelah adanya bencana gempa 31 September 2009 silam. Faktor keamanan dan kenyamanan memunculkan keraguan dalam diri para pegawai yang menanyakan, apakah kondisi fisik bangunan masih layak digunakan atau tidak.



Hal lain yang juga mempengaruhi kenyamanan adalah tata letak ruangan, kurangbaiknya tata letak antar meja para pegawai mengurangi kenyamanan para pegawai dalam bekerja.

Persepsi mengenai daya listrik, para pegawai di kedua bagian sama-sama mengeluhkan sering padamnya listrik yang dilakukan PLN kota Padang pada kantor mereka, sementara generator listrik juga belum tersedia, baru beberapa ruangan yang memilikinya. Hal ini dapat menghambat kerja para pegawai, terutama pada saat menggunakan komputer. Penggambaran ketersediaan Prasarana pada DPKD Sumbar dapat dilihat pada diagram pie 4.15 berikut ini

**DIAGRAM PIE 4.15 KETERSEDIAAN PRASARANA**

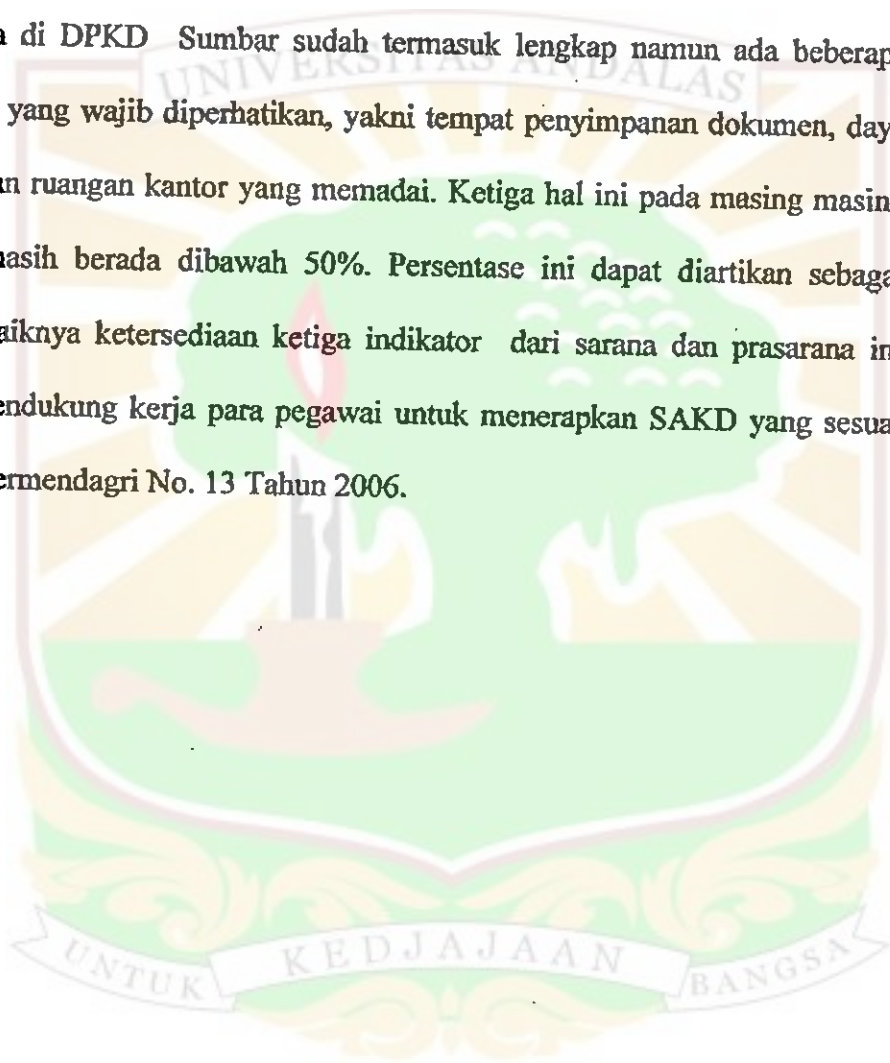


Rata-rata keseluruhan persepsi para pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di DPKD Sumbar dalam rangka sebagai salah satu faktor pendukung penerapan SAKD yang sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah sebesar 61,58%. Angka ini



menunjukkan bahwa para pegawai berasumsi bahwa DPKD Sumbar sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk mendukung penerapan SAKD.

Kedua hal yang mendukung penerapan SAKD yakni sarana dan prasarana di DPKD Sumbar sudah termasuk lengkap namun ada beberapa indikator yang wajib diperhatikan, yakni tempat penyimpanan dokumen, daya listrik, dan ruangan kantor yang memadai. Ketiga hal ini pada masing masing bagian masih berada dibawah 50%. Persentase ini dapat diartikan sebagai kurang baiknya ketersediaan ketiga indikator dari sarana dan prasarana ini dalam mendukung kerja para pegawai untuk menerapkan SAKD yang sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, menunjukkan persepsi pegawai DPKD Sumatera Barat bahwa penerapan SAKD pada DPKD provinsi Sumatera Barat sudah sangat baik dan sangat sesuai dengan Pedoman yang tertera dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Hal ini terlihat dari sudah dilaksanakannya buku jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu. Dari laporan keuangan yang diperoleh, terlihat pula bahwa DPKD Sumbar sudah menerapkan prosedur pengeluaran dan penerimaan kas, serta membagi aliran-aliran kas tersebut kedalam bagian-bagian tertentu.

Para pegawai di DPKD Sumbar tetap berusaha untuk menjadi lebih baik sehingga dapat memuaskan keinginan stakeholder. Keinginan DPKD Sumbar untuk lebih baik itu harus didukung dari internal dinas tersebut, dua hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas pegawai dan sarana prasarana yang mendukung. Dari sisi pegawai, pegawai di DPKD Sumbar, khususnya di bidang anggaran dan Akuntansi telah memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai SAKD, serta telah bekerja dengan berpedoman terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006, dan pedoman lainnya yang relevan.

Sementara dari segi dukungan kualitas sarana dan prasarana, pegawai DPKD Sumbar berpendapat bahwa DPKD Sumatera Barat telah memiliki cukup sarana dan prasarana untuk membantu kerja para pegawai, namun

DPKD Sumbar masih harus mengevaluasi kembali kedua faktor yang sangat mempengaruhi kerja DPKD itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tempat penyimpanan dokumen, daya listrik, serta ruangan kerja pegawai di tiap-tiap bagian DPKD Sumbar.

Dari ketiga kriteria yang diteliti, yakni persepsi pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap kesesuaian SAKD, pemahaman para pegawai terhadap SAKD, serta persepsi pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap ketersediaan saran dan prasarana, DPKD Sumbar mendapatkan skor rata-rata 75,82%.

Para pegawai DPKD Sumbar mengharapkan adanya peningkatan kualitas hasil kerja, namun hal ini harus mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Sumbar, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat semakin baik.

## V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan saran-saran terkait dengan hal-hal yang masih dianggap kurang, sebagai berikut:

1. DPKD Sumbar hendaknya dapat meningkatkan kualitas ruangan, dengan melakukan renovasi atau beberapa perbaikan jika ada bangunan yang dianggap rusak, tata letak antar meja para pegawai juga diharapkan dapat diatur ulang sehingga dapat memberikan suasana kerja yang lebih baik bagi para pegawai.

2. Intensitas padamnya listrik, bukan semata-mata akibat kesalahan DPKD Sumbar terhadap kurangnya daya listrik, namun lebih ke Pemerintah Kota Padang yang melakukan pemadaman lampu secara bergiliran, sehingga dinas ini terkena dampaknya. Sering padamnya listrik dapat menghambat kerja para pegawai yang berakibat dari kurang dapatnya DPKD Sumbar memenuhi keinginan para stakeholder tepat waktu. Alangkah baiknya jika DPKD dapat menyediakan generator listrik, karena jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman, maka ada alternatif lain untuk para pegawai dapat melanjutkan pekerjaannya.
3. DPKD lebih memperhatikan tempat penyimpanan dokumen dan menyimpan dokumen salinan di tempat yang berbeda.

### **V.3 Keterbatasan Penelitian**

Dari penelitian kali ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mengganggu hasil dari penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Responden yang diperoleh hanya sebanyak 19 orang. Ini disebabkan adanya pelatihan yang dilakukan pegawai.
2. Ketidaktelitian responden dalam mengisi jawaban, seperti yang dijelaskan oleh Suhaimi Arikunto dalam bukunya “ Prosedur Penelitian Suatu Praktek ” ada beberapa kelemahan dari penelian yang menggunakan kuisisioner, yaitu responden sering tidak teliti dan tidak jujur dalam menjawab dan sukar dicari validasinya.
3. Adanya pembulatan desimal. Hal ini mungkin bisa mempengaruhi hasil dari penelitian.

4. Penelitian hanya dapat dilakukan di dua bagian yakni Akuntansi dan Anggaran.
5. Hal yang diteliti semata-mata hanya dari pandangan atau persepsi pegawai DPKD Sumbar, sehingga ada kemungkinan perbedaan dengan kejadian yang sebenarnya.





## DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi, 1998, Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Yogyakarta
- Bastian, Indra dan Gatot Suprianto, 2002, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Departemen Dalam Negeri, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Djunid, Amsal, 1999, Sistem Informasi Manajemen, Buku Panduan Belajar Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Padang.
- Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2001, Akuntansi Sektor Publik, ANDI, Yogyakarta.
- Supriana, Tjahya, 1993, Sistem Administrasi Pemerintah di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [http : // google.co.id / pemerintah / index.php. / definisi-desentralisasi /](http://google.co.id/pemerintah/index.php/definisi-desentralisasi/) online diakses 3 Februari 2010.
- [http : // google.co.id / penelitian / index.php. / penelitian-deskriptif /](http://google.co.id/penelitian/index.php/penelitian-deskriptif/) online diakses 7 Maret 2010.

<http://www.creativebrain.web.id/media.php?action=readnews&id=84&title=Pengertian%20Sistem%20Menurut%20Para%20Ahli>, diakses 26 Mei 2010.

<http://www.seputarakuntansi.info/2009/07/pengertian-akuntansi.html>, diakses 26 Mei 2010.

<http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/41-definisi-sistem-akuntansi.pdf>, diakses 26 Mei 2010.

<http://www.catatan-sgenk.co.cc/2009/10/definisi-akuntansi-keuangan-auditing.html>, diakses 26 Mei 2010.

<http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-aman%20nasution.pdf>, diakses 26 Mei 2010.

<http://alisjahbana.blogdetik.com/2008/11/05/good-governance-sebuah-harapan-2/> diakses 10 Agustus 2010.



### Kuisisioner Penelitian

#### **Persepsi Pegawai DPKD Sumatera Barat Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah I. Pendahuluan**

Kuisisioner ini merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi dibawah bimbingan Bapak Drs. Edi Herman, MBA, Ak. Dengan judul “ **Persepsi Pegawai DPKD Sumatera Barat Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**”.

Saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan pada kuisisioner ini demi kelancaran penelitian saya, dan saya berjanji keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini hanya akan saya gunakan untuk kepentingan penyusunan skripsi.

#### **II. Identitas**

Dinas / Instansi :

Lama bekerja :

Pendidikan terakhir :

Jabatan :

#### **III. Daftar Pertanyaan**

##### **Bagian 1**

##### **Petunjuk pengisian :**

Silanglah ( X ) salah satu jawaban yang dianggap benar.

1. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah dimulai dari tahap pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyusunan laporan keuangan. Untuk mencatat seluruh transaksi / kejadian keuangan secara kronologis ( sesuai urutan waktu ) digunakan :

- a. Buku kas umum
- b. Buku register
- c. Buku jurnal
- d. Buku rekonsiliasi

2. Dalam sistem tata buku berpasangan (*double entry*) pencatatan transaksi melibatkan . . . . sisi yang jumlahnya harus seimbang.

- a. Dua
- b. Empat

- c. Enam
- d. Nol

3. Buku besar pembantu digunakan untuk :

- a. Mencatat uang masuk dan uang keluar
- b. Mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam buku jurnal
- c. Mengklasifikasikan transaksi
- d. Merinci rekening dalam buku besar

4. Laporan pertanggungjawaban keuangan pada SAKD adalah, kecuali :

- a. Laporan aliran kas
- b. Laporan perubahan modal
- c. Neraca
- d. Laporan perhitungan APBD

5. Laporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir. *Periode akuntansi* untuk pelaporan keuangan daerah adalah:

- a. Lima tahun
- b. Sesuai periode anggaran
- c. Triwulan
- d. Semesteran

6. Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai :

- a. Posisi keuangan
- b. Laba/rugi
- c. Pendapatan dan belanja
- d. Posisi aktiva

7. Komponen neraca adalah, kecuali :

- a. Kas dan setara kas
- b. Tanah
- c. Hutang jangka panjang
- d. Biaya pemeliharaan

8. Aktiva dalam laporan keuangan daerah terdiri dari, kecuali :

- a. Investasi jangka panjang
- b. Aktiva lancar
- c. Aktiva tetap

d. Aktiva jangka panjang

9. Depresiasi (penyusutan) adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang umur ekonomisnya. Aktiva tetap milik daerah berikut yang harus diapresiasi adalah, kecuali :

- a. Gedung
- b. Kendaraan
- c. Jalan dan jembatan
- d. Tanah

10. Aliran kas yang disajikan dalam laporan aliran kas berasal dari antara lain:

- a. Aktivitas manajemen dan investasi
- b. Aktivitas investasi dan pembiayaan
- c. Aktivitas keuangan dan operasi
- d. Aktivitas keuangan dan manajemen

11. Laporan yang merinci perbandingan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan realisasinya serta menjelaskan penyebab perbedaan yang signifikan antara anggaran dengan realisasinya adalah:

- a. Laporan laba rugi
- b. Laporan perhitungan APBD
- c. Laporan sumber dan penggunaan dana
- d. Laporan pertanggungjawaban daerah

12. Perbedaan basis akrual dengan basis kas untuk pelaporan keuangan terletak pada :

- a. Pengakuan transaksi
- b. Pengelompokan transaksi
- c. Persetujuan transaksi
- d. Pemeriksaan transaksi

13. Kekayaan bersih pemerintah daerah yaitu selisih aktiva dengan hutang disebut :

- a. Ekuitas dana
- b. Keuntungan
- c. Modal disetor
- d. Pendapatan daerah

14. Struktur anggaran terdiri dari, kecuali :

- a. Anggaran pendapatan
- b. Anggaran keuangan



- c. Anggaran belanja
- d. Anggaran pembiayaan

15. Posting ke buku besar dilakukan setelah :

- a. Dijurnal
- b. Dicatat ke kertas kerja
- c. Dicatat ke buku pembantu
- d. Terjadi transaksi

16. Berikut ini komponen laporan keuangan yang perlu *jurnal penyesuaian* pada akhir periode akuntansi, kecuali :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Ekuitas dana
- d. aktiva

## Bagian 2

### Petunjuk pengisian :

Merujuk kepada Bab III, yaitu mengenai metodologi penelitian, dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan Persepsi Pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap Kesesuaian Penerapan SAKD pada DPKD Sumatera Barat sebagai dependen variabel, dan Pemahaman Pegawai DPKD Sumatera Barat serta, Persepsi Pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana sebagai variabel penguat.

Pada bagian dua ini penelitian difokuskan pada Persepsi Pegawai terhadap Kesesuaian penerapan SAKD pada DPKD Sumatera Barat dan Persepsi Pegawai DPKD Sumatera Barat terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana sebagai variabel penguat.

Pertanyaan yang diajukan menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan peraturan lain yang dinggap relevan.

Beri tanda benar atau checklist pada salah satu kolom jawaban.

### Keterangan jawaban

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TT = Tidak Tahu
- KS = Kurang Setuju
- TS = Tidak Setuju

NO	KETERANGAN	SS	S	TT	KS	TS
1	Dalam menerapkan SAKD Kepala Daerah sudah menerbitkan keputusan tentang sistem akuntansi keuangan daerah					
2	Pejabat daerah yang bertugas mengelola keuangan dan barang serta menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah					
3	Dalam pengelompokan belanja daerah sudah ada belanja urusan wajib, belanja urusan pilihan, belanja urusan pemerintahan, belanja berdasarkan fungsi, berdasarkan organisasi, berdasarkan program, belanja langsung, dan belanja tidak langsung					
4	Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi; pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah					
5	Semua transaksi keuangan Pemda dibukukan pada buku jurnal					
6	Pemda menggunakan: buku jurnal umum, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal penerimaan kas					
7	Pemda mempunyai buku besar dan buku besar pembantu untuk melanjutkan pencatatan transaksi, selain pada jurnal					
8	Sudah ada sistem atau prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, aset dan selain kas					
9	Periode laporan keuangan sama dengan periode anggaran					
10	Pemda telah menyiapkan laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas, dan neraca					
11	Laporan keuangan daerah disajikan dengan membandingkannya dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
12	Laporan keuangan diterbitkan tepat waktu					
13	Laporan keuangan diumumkan kepada publik melalui media massa dan internet					
14	Laporan realisasi anggaran menyajikan perbandingan anggaran dan realisasinya					

15	Informasi penerimaan dan pengeluaran kas dikelompokkan kedalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan					
16	Aktiva, hutang, dan ekuitas dana pemda dapat dilihat di neraca					
17	Pencatatan transaksi pemda dilakukan saat ada penerimaan atau pengeluaran uang, dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian					
18	Sudah ada penggunaan kode rekening akuntansi dalam pengelolaan keuangan pemda					
19	Seluruh transaksi dilaporkan dalam mata uang rupiah					
20	Penerapan SAKD telah didukung dengan penggunaan komputer					
21	Sudah ada jaringan yang menghubungkan antar komputer ( LAN )					
22	Perangkat lunak (software) komputer khusus SAKD telah tersedia					
23	Printer dan alat-alat cetak lainnya sudah ada					
24	Telah tersedia tenaga ahli yang dapat membantu menerapkan SAKD					
25	Penerapan SAKD menggunakan manual atau petunjuk yang jelas					
26	Ruangan kantor memadai untuk menerapkan SAKD					
27	Perlengkapan kantor seperti kertas dan alat-alat tulis cukup tersedia					
28	Daya listrik memadai untuk menggunakan komputer					
29	Tempat penyimpanan dokumen memadai					

MOHON SEMUA JAWABAN DIPERIKSA KEMBALAI AGAR TIDAK ADA PERTANYAAN YANG BELUM TERJAWAB

TERIMA KASIH BANYAK ATAS BANTUAN BAPAK/IBU, SEMOGA TUHAN YME MEMBALAS KEBAIKAN BAPAK/IBU.

## LAMPIRAN I

TABEL UJI VALIDASI KONSTRUK

DATA SETELAH DISUSUN ULANG, YANG MEMENUHI KRITERIA VALID ( $r > 0,456$ ) DENGAN KETENTUAN ( $N = 19, 5\%$ )

PENGUJIAN VALIDASI KÖNSTRUK												PENGUJIAN JAWABAN KE												TOTAL	
NO RESPONDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24
1	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	1	1	90
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	1	1	88
3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	1	4	1	1	90
4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	2	2	108
5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	2	4	2	2	95
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1	1	87
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	1	2	88
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	2	2	89
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	2	1	89
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	1	89
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	103
12	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	2	4	2	2	101
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	5	2	1	99
14	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	2	5	2	2	103
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	1	89
16	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	2	5	3	2	103
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	90
18	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	1	4	1	1	96
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	5	1	1	88



TABEL UJI RELIABILITAS

TABEL KELOMPOK GANJIL														
RESPONDEN	PERTANYAAN KE													
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	TOTAL	
1	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	1	44	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	1	43	
3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	1	1	43	
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	2	2	53	
5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	2	2	47	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	42	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	42	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	2	43	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	2	43	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	44	
11	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	2	2	51	
12	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	2	2	49	
13	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	2	2	49	
14	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	2	2	50	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	44	
16	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	2	3	50	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	44	
18	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	1	1	46	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	42	

LAMPIRAN 3

TABEL UJI RELIABILITAS

TABEL KELOMPOK GENAP																			
RESPONDEN	PERTANYAAN KE																	TOTAL	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24							
1	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	46					
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	45					
3	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	1	47					
4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	2	55						
5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2	48						
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	45						
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	46						
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	46						
9	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	1	46						
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	45						
11	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	2	52						
12	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	2	52						
13	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	1	50						
14	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	2	53						
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	45						
16	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	2	53						
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	46						
18	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	1	50						
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	1	46						

# LAMPIRAN 4

## Data Yang Tidak Valid Untuk Penelitian

Pertanyaan awal ke 16	Pertanyaan awal ke 19	Pertanyaan awal ke 21	Pertanyaan awal ke 23	Pertanyaan awal ke 24
4	4	4	4	4
4	4	5	4	4
4	5	4	4	4
4	5	5	4	4
4	4	4	4	4
4	4	5	5	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
4	5	4	4	4
4	4	4	4	4
4	5	4	4	5
5	5	5	4	5
4	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	4	4	4	4
4	4	4	4	4
5	4	4	4	5
4	4	4	4	4
0,423564	0,391903	0,217451	-0,19409	0,403034

Data tidak digunakan untuk penelitian lebih jauh karna tidak memiliki nilai korelasi diatas 0,456(N=19, 5%)



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554  
**P A D A N G**

**REKOMENDASI**  
**No.B.070/ - /WAS-BKPL/2010**  
**Tentang**  
**Izin Permintaan Data**

Kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari surat Dekan Fakultas Ekonomi Unand Padang Nomor : 333/Akt-FEUA/XII/2009 tanggal 2 Maret 2009 perihal Surat izin Permintaan Data dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Permintaan Data di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama	: Anindito Aditya
Tempat/Tgl Lahir	: Jakarta 14 Desember 1988
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Handayani 1. No.11. Perumdam 3 Siteba PdG
No.Kartu Identitas	: 03153127
Judul Permintaan Data	: Penerapan Fungsi-fungsi manajemen dalam pembentukan serta penggunaan dana cadangan
Lokasi/Tempat Permintaan Data	: DPKD Prov. Sumbar
Waktu/Lama Permintaan Data	: 2 Minggu
Anggota	

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Permintaan Data
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Permintaan Data yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Permintaan Data.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil Permintaan Data sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq.Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/peleanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi Permintaan Data ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, Maret 2010  
**BADAN KESBANG POL DAN LINMAS**  
**PROP. SUMATERA BARAT**  
Kantor Kepala Perwakilan



**Tembusan Kpd. Yth**

1. Bapak Mendagri Cq.Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Kepala DPKD Prov. Sumbar di Padang
4. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Unand di Padang
5. Peringatan





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Asahan No. 2 Telp. (0751) 7051536 - 7054536 Padang

Padang, 15 Maret 2010

Nomor : 423/407 /Umum-2010  
Lamp. :  
Hal : Persetujuan Penelitian

Kepada

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Unand  
Padang  
di

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : B.070/204/WAS-BKPL/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Izin Permintaan Data di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut ;

No	Nama	No. BP	Judul Skripsi
1.	Anindito Aditya	06153127	Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam pembentukan serta penggunaan dana cadangan

Berkenan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa tersebut selama 2 (dua) Minggu.

Demikianlah disampaikan kepada Saudara, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

AN. KEPALA PROS. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
SUMATERA BARAT

Sekretaris,  
DA IISMAYARNI, SEM.Kes  
Pembina  
NIP. 19650603 199109 2 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Bidang BUD
2. Sdr. Kepala Bidang Anggaran